

# Swantara

Majalah Triwulanan Lemhannas RI No. 20 Tahun VI / Maret 2017

- **Gemuruh Keras  
Pergeseran Ekonomi Dunia**  
Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
- **Pergeseran Kekuatan  
Migas Dunia**  
Parulian Sihotang
- **OPINI :  
NDC Indonesia: The Grand Design of  
Environmental Resilience of Indonesia**  
Dr. IR. Nur Masripatin M. For. Sc

# Indonesia Di Tengah Dinamika GEOPOLITIK GLOBAL

ISSN 2252-9659



9 772252 965956





Saudi Armed Forces Command and Staff College Lakukan Kunjungan ke Lemhannas RI guna Pererat Kerja Sama



# Catatan Redaksi

**PELINDUNG** AGUS WIDJOJO

**PEMBINA** BAGUS PURUHITO

**PENGARAH** ARIEF WACHYUNADI

**PENASEHAT** SAKKAN TAMPUBOLON,

DJAGAL WISESO MARSENO, DEDY YULIANTO

**PEMIMPIN REDAKSI** E. ESTU PRABOWO

**REDAKTUR PELAKSANA** WAHYU WIDJI PAMUNGKAS

**EDITOR** BAMBANG IMAN ARYANTO, ENDAH HELIANA

**STAF REDAKSI** NI MADE VIRA SARASWATI, C. HILDAMONA

PERMATASARI, MAGISTA DIAN

**KOORDINATOR FOTOGRAFER** M. ISDAR

**FOTOGRAFER** SURYADI, SUYONO

**GRAFIS** BAMBANG IMAN ARYANTO

**PEMIMPIN ADMINISTRASI** LINDA PURNAMASARI

**STAF ADMINISTRASI** MARDIANA, GATOT

**SIRKULASI** SUPRIYONO, AYU NOVITA SARI

**ALAMAT REDAKSI** LEMHANNAS RI

JL. MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA

**TELP.** (021) 3832108, 3832109

**FAX**(021)-3451926

**EMAIL** : humas@lemhannas.go.id

**WEBSITE** : www.lemhannas.go.id

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR

LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA

SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera  
Om Swasti Astu

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Majalah Triwulan Lemhannas RI "Swantara" edisi ke 20 bulan Maret 2017 dapat kembali hadir di tengah-tengah para pembaca setia.

Pembaca yang budiman, pada edisi ke 20 ini, redaksi mengangkat tema "Indonesia di Tengah Dinamika Geopolitik Dunia. Tema ini sengaja kami angkat sejalan dengan rencana Lemhannas RI yang akan menggelar acara Jakarta Geopolitical Forum yang pertama, pada tanggal 18,19, dan 20 Mei 2017. Tema ini juga kami tampilkan sebagai upaya untuk membantu pemerintah memperkenalkan kembali pentingnya pemahaman konsep geopolitik dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional negara ini.

Untuk mengulas tuntas tema geopolitik, dalam edisi ini redaksi menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, baik dari kalangan akademisi, pengamat, maupun pemangku kebijakan dan praktisi. Dari kalangan akademisi ekonomi politik kami hadirkan Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, sementara dari pengamat politik kami mewawancarai Ikrar Nusa Bhakti, pengamat geopolitik Hendrajit. Lalu, dari kalangan pemangku kebijakan kami mewawancarai Deputy Bidang Pengendalian Keuangan SKK Migas Parulian Sihotang. Sedangkan dari kalangan praktisi kami mewawancarai pegiat LSM bidang perlindungan pengungsi dan imigran, Fitriana Nur dari International Organization for Migration (IOM).

Selain itu untuk memperkaya ulasan di edisi ini, kami juga mewawancarai Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo, Taprof Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, Putu Sastra Wingarta, dan Taprof Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Dr. Anhar Gonggong.

Redaksi menyadari bahwa tulisan yang disajikan di majalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami selalu mengharapkan kritik dan masukan demi kemajuan karya jurnalistik yang kami sajikan di edisi mendatang. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memaparkan pemikirannya di rubrik opini.

Semoga majalah Swantara senantiasa hadir di hati para pembaca setia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera  
Om Shanti Shanti Shanti Om

Pemimpin Redaksi



# SUARA PEMBACA

---



## Mengatasi Intoleransi

Kasus intoleransi di negeri ini terus meningkat. Mulai dari ranah media sosial, media cetak, hingga media online, kini sangat mudah menyebarkan informasi - informasi yang justru semakin memperkeruh suasana dan bahkan mengadu domba. Sehingga banyak pemilik akun media sosial yang hanya memahami informasi yang jauh dari objektivitas. Cara paling sederhana untuk mengatasi hal tersebut adalah kesadaran dari tiap individu untuk memilih berita dan media yang tepat dan terpercaya. Saya rasa majalah Swantara merupakan salah satu majalah yang mampu memberikan informasi yang jelas, tidak berpihak dan terpercaya. Jaya terus Swantara! (Ikhlā Maulidya, S.Psi.)

## China raksasa dunia?

Keputusan pemerintah China untuk menurunkan target pertumbuhan ekonominya menjadi 6,5 % di awal tahun 2017 tentu akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi global termasuk di Indonesia, terlebih China saat ini digadang-gadang akan menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia mengalahkan Amerika Serikat. Saya harap kedepannya Majalah Swantara dapat

mengulas mengenai topik ini secara lebih luas dan mendalam. Agar pembaca dapat mengetahui mengenai perkembangan ekonomi di dunia saat ini. Terima kasih. Maju terus Swantara! (Indah Rorine, S.E.)

## Mengharapkan Konsistensi

Konten majalah Swantara saya rasa sudah cukup baik, pemilihan tema dan narasumber yang beragam mampu memberikan pengetahuan baru bagi pembaca. Terima kasih Swantara sudah menyajikan topik - topik menarik. Saya harap Swantara dapat terus konsisten untuk menjadi media informasi yang bermanfaat bagi pembaca. (Arrienda R. D. W., S.S.)

## Membangun Infrastruktur

Akhir tahun lalu muncul wacana bahwa pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan berbagai sektor infrastruktur pada tahun 2019 di seluruh Indonesia yang



mencapai angka fantastis. Namun, menurut saya langkah tersebut harus diiringi dengan kesiapan pemerintah terutama perihal alokasi dana. Jangan sampai niatnya membangun infrastruktur, malah membuat negeri hancur karena terbelit hutang. (Boy Anugerah, S. I. P)



**Sejarah**

- 08 Belajar dari Perjalanan Geopolitik Bangsa

**Laporan Utama**

- 22 Gemuruh Keras Pergeseran Ekonomi Dunia
- 24 Pergeseran Kekuatan Migas Dunia
- 26 Meremajakan Pancasila guna Meningkatkan Ketahanan nasional
- 29 Malapetaka Di Balik Konflik Dunia

**Intermezzo**

- 34 Cegah Diabetes dengan Cara Alami

**Suara Alumni**

**Hot Issue**

- 40 Artis Hollywood Ramai-ramai Kecam Trump
- 41 Wisata Bali yang Mempesona Raja Salman
- 42 Kapal Pesiar Inggris Tabrak Karang Raja Ampat
- 43 KKP Segera Tenggelamkan 70 Kapal Ilegal

**Seputar Kita**

- 44 Gubernur: Gali Hakikat Nilai Kebangsaan
- 45 Lemhannas RI Selenggarakan Taplai di Tarakan
- 46 The United Kingdom DCDC kunjungi Lemhannas RI
- 49 Kunjungan SMAN 1 Padang Ke Lemhannas RI

**Profil**

- 51 Siti Fadhillah - Kasubbag Akunting Biro Keuangan Lemhannas RI

**Sosok**

- 54 Danny Pomanto: Mencipta Smart City yang Punya Hati

**Resensi Buku**

- 57 Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru

**Serambi Monas**

- 58 Melihat Konflik dari Sudut Pandang Berbeda

**Galeri**

**Agenda**

*Laporan Utama  
Indonesia di Tengah Dinamika Geopolitik Global*



*Laporan Utama  
Membaca Situasi  
Geopolitik Dunia*



*Profil  
Bahagia  
di Dunia  
Pendidikan*



*Opini  
NDC Indonesia :  
The Grand  
Design of  
Environmental  
Resilience  
of Indonesia*

# Belajar dari Perjalanan Geopolitik Bangsa

**S**eperti diketahui, momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 terjadi di saat dunia mengalami perubahan geopolitik penting. Perang Dunia kedua usai, dengan kemenangan pihak Sekutu melawan Jerman di Eropa dan Jepang di Asia Pasifik. Jepang yang waktu itu menduduki Indonesia pun terusir keluar dari bumi Nusantara. Kekosongan kekuasaan penjajah di Indonesia, dimanfaatkan dengan baik oleh para pendiri bangsa dengan menyatakan kemerdekaan, dan menyebarkanluaskannya ke berbagai pelosok dunia.

Peristiwa penting ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa ini mampu membaca dinamika geopolitik internasional yang tengah terjadi, dan memanfaatkannya untuk keuntungan bangsa dan rakyat Indonesia. Berkat pemahaman tentang geopolitik yang baik pulalah para pemimpin bangsa ini sempat membawa Indonesia menjadi negara yang mampu unggul bernegosiasi dan berdiplomasi dengan negara

besar seperti Belanda dan Amerika Serikat.

Namun, apakah sebenarnya geopolitik? Menurut kamus *The Penguin Dictionary of International Relations*, geopolitik adalah sebuah metode untuk mempelajari politik



DR. Anhar Gonggong

luar negeri suatu negara, untuk bisa memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku politik internasional, melalui variabel-variabel geografi. Seperti variabel tempat, demografi, sumber daya

alam, iklim, topografi, dan lain-lain.

Nah, pengetahuan geopolitik internasional, serta pemahaman yang tepat atas segala kekuatan dan kelemahan negeri, bisa menjadi cara yang tepat untuk memetakan posisi Indonesia di tengah percaturan politik internasional. Dan, jika disimak dari sisi sejarah, cukup banyak pemimpin Indonesia paham betul keunggulan geopolitik negeri ini. Dan, ternyata para pemimpin Indonesia pun cukup sering menunjukkan kebolehannya dalam memanfaatkan segenap keunggulan geopolitiknya untuk mendapatkan ‘kemenangan-kemenangan’ politik di forum internasional.

“Para pemimpin kita dahulu merupakan orang yang hebat yang mampu menganalisa hal-hal yang akan terjadi saat itu. Sejak dulu para pemimpin kita tidak pernah mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis,” tegas Dr. Anhar Gonggong, sejarawan dan Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI.

Untuk memberi gambaran tentang interaksi Indonesia dengan dinamika geopolitik dunia di setiap lini masa, berikut ini kami rangkum beberapa kejadian penting Indonesia di kancah internasional dari masa ke masa, sesuai dinamika geopolitik yang melatarbelakanginya.





### Tumbuhnya Pemikiran Geopolitik Soekarno Muda

SEJAK TAHUN 1928, Soekarno muda sudah mulai gemar mengamati dinamika politik internasional. Mulai dari memetakan kekuatan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, daerah jajahan Inggris, Belanda, dan Prancis, sampai mengamati pergeseran kekuatan antara paham kapitalisme dan fasisme. Lalu, pada tahun 1929 ia membaca buku terkenal karya Hector Charles Bywater berjudul *“The Great Pacific War”*. Buku itu memprediksi akan terjadinya perang besar antara kekaisaran Jepang dan Amerika Serikat yang memperebutkan wilayah Asia Pasifik. Digambarkan dalam buku itu perang berawal dari serangan Jepang ke pangkalan militer AS di Filipina. Prediksi ini hanya sedikit berbeda dengan kenyataan yang terjadi bahwa Jepang justru menyerang pangkalan AS di Pearl Harbour.

Dengan pemikiran yang sangat maju di tahun 1929 itu, Soekarno muda mencoba menganalisa dan

memprediksi pola penyerangan Jepang secara lebih detail ke Filipina yang letaknya sangat dekat dengan Indonesia. Jepang ia perkirakan akan menyerang Filipina langsung dari Okinawa, atau dengan menduduki pulau Jawa terlebih dulu. Jika melalui pulau Jawa, maka pendudukan ini akan mengusir Belanda dari pulau Jawa, atau bahkan mengusirnya dari seluruh Nusantara.

Lalu, berbekal pengetahuan akan akar budaya yang baik, Soekarno juga mampu menghubungkan prediksi Bywater ini dengan ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa kelak akan ada bangsa bertubuh pendek, berkulit kuning yang akan menguasai tanah Jawa seumur jagung. Istilah seumur jagung pada pemahaman bahasa Jawa artinya waktu yang singkat, hanya sekitar 3,5 bulan.

“Ketika diadili di Bandung tahun 1930, Soekarno sudah memberikan analisa yang jelas tentang bagaimana pertarungan antara kekuatan politik saat itu, dan ia ramalkan di Pasifik akan terjadi perang antara Amerika

dan Jepang,” jelas Dr. Anhar Gonggong.

Maka, jauh-jauh hari sebelum pecah perang Asia Pasifik, Soekarno sudah mulai mengantisipasi dan mempersiapkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Di benak Soekarno, jika Jepang akan mampu menggulingkan Belanda dari Indonesia, Jepang ia prediksi hanya akan menguasai Indonesia dalam waktu singkat. Pasalnya, ia yakin fasisme tidak akan bertahan lama dan akan segera runtuh. Berbekal analisa geopolitik yang tajam, Soekarno muda pun bertekad bahwa perang besar Asia Pasifik ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka.

### Perjanjian Linggarjati

SETELAH MENYATAKAN proklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda. Tapi, Belanda tidak menerima begitu saja, dan bahkan berusaha untuk menginvasi Indonesia kembali. Peperangan pun

terjadi, sehingga pemerintah Inggris yang waktu itu menjadi penanggung jawab penyelesaian konflik militer dan politik di Asia, mendesak agar Indonesia dan Belanda melakukan perundingan. Perjanjian Linggarjati kemudian digelar pada 11 November 1946. Pihak Indonesia mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Hasil perundingan, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia

berakhir, muncul dua kutub kekuatan besar di dunia, yaitu blok Barat yang dimotori oleh AS dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perbedaan ideologi dan kepentingan antara kedua blok seringkali menyebabkan perselisihan dan konflik, sehingga merebaklah perang dingin antara keduanya. Nah, di tengah suhu geopolitik yang meningkat, setiap negara yang ada di dunia waktu itu

bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia.

Pilihan Indonesia itu dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional utamanya saat itu, yaitu mencari dukungan dan pengakuan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan pemahaman geopolitik yang tepat, para pemimpin bangsa saat itu menyadari, bahwa keterikatan pada salah satu blok yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu, negara-negara blok Barat masih ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang juga merupakan anggota blok Barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia saat itu juga belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan yang diberikan negara blok Timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB.

Setahun kemudian, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya secara resmi. Tepatnya, ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan keterangan di hadapan BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengenai kedudukan politik Indonesia pada 2 September 1948. Dalam pidatonya yang berjudul “Mendayung di antara Dua Karang”, Hatta menegaskan bahwa Indonesia menolak untuk masuk ke dalam salah satu blok dalam perang dingin.

Hal ini terlihat jelas dari cuplikan isi pidato itu: “Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan



pintuwisata.com

terdiri dari Jawa dan Madura saja, dan Belanda harus meninggalkan RI paling lambat 1 Januari 1949. Selain itu, akan dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan bagian dari Persemakmuran Indonesia Belanda yang ada di bawah pimpinan Belanda.

Perjanjian ini merugikan Indonesia, karena wilayah Indonesia menjadi sangat kecil. Namun, di sisi lain perjanjian ini juga membawa hasil yang tak mengecewakan. Karena, untuk pertama kalinya Belanda dan juga dunia internasional mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Apalagi, kemudian beberapa negara di kawasan Arab mulai mengakui kedaulatan RI ini.

### **Politik luar Negeri Bebas dan Aktif**

SETELAH PERANG DUNIA II

seakan harus memilih untuk masuk ke dalam kubu blok Barat atau blok Timur. Tak terkecuali Indonesia. Negara yang baru berdiri ini seakan langsung diberi pilihan untuk masuk blok AS atau blok Uni Soviet.

Uniknya, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Sinyal itu untuk pertama kali diuraikan oleh Sutan Sjahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri RI, melalui pidatonya pada ajang Inter Asian Relations Conference di New Delhi yang dilaksanakan pada 23 Maret–2 April 1947. Dalam pidato itu, Sjahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia. Hal ini, menurut Sjahrir, hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar



politik Internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.”

Sejak itu, Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara adidaya, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam

MESTIKAH KITA BANGSA  
INDONESIA YANG  
MEMPERJUANGKAN  
KEMERDEKAAN BANGSA DAN  
NEGARA KITA, HARUS MEMILIH  
ANTARA PRO-RUSIA ATAU PRO-  
AMERIKA. APAKAH TIDAK ADA  
PENDIRIAN YANG LAIN YANG  
HARUS KITA AMBIL DALAM  
MENGEJAR CITA-CITA KITA?

MENDAYUNG DI ANTARA DUA  
KARANG, PIDATO BUNG HATTA 2  
SEPTEMBER 1948.

pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia.

Mochtar Kusumaatmadja kemudian merumuskan politik luar negeri bebas aktif sebagai berikut: Bebas, berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, artinya di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif

atas kejadian-kejadian Internasional, melainkan bersifat aktif.

### Merebut Kembali Irian Barat

BERDASARKAN HASIL perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda pada 23 Agustus - 2 November 1949, pihak Belanda akhirnya pada 27 Desember 1949 secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, wilayah Irian Barat (sekarang Papua) masih merupakan wilayah “status quo”, dan penyelesaiannya ditangguhkan sampai setahun berikutnya. Tapi, kenyataannya masalah Irian Barat ini tak kunjung diselesaikan oleh pihak Belanda.

Sementara, kondisi politik bangsa Indonesia dalam bentuk negara serikat yang bersistem parlementer masih belum stabil. Soekarno waktu itu hanya berstatus sebagai kepala negara atau presiden. Sementara, kepala pemerintahan ketika itu dipimpin oleh perdana menteri yang kerap berganti-ganti. Sebab itu, masalah Irian Barat pun belum sempat diselesaikan. Namun, keadaan berubah sejak 5 Juli 1959 ketika Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD

1945. Sejak itu, Soekarno menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. “Setelah menjadi kepala pemerintahan, salah satu yang Soekarno lakukan adalah geopolitik, yaitu (berusaha) memasukkan Irian Barat ke dalam negara Indonesia,” ujar Dr. Anhar Gonggong, sejarawan dan Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI.

Waktu itu, Belanda pada 1960 ingin membuat negara boneka, yaitu negara Papua sebagai negara yang berdiri sendiri di luar Indonesia. Indonesia jelas menolak ini. Pada 1961, Soekarno pun melancarkan Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk merebut kembali Irian Barat. Dan, untuk memastikan keberhasilan Indonesia mengembalikan Irian Barat, Soekarno kembali menggunakan pemahaman geopolitiknya yang mendalam tentang peta kekuatan politik internasional saat itu.

Soekarno paham betul bahwa untuk berperang menghadapi Belanda di Papua, ia membutuhkan perlengkapan militer yang besar dan kuat. Untuk itu, pemerintah butuh dana besar, dan Soekarno mencoba mencari bantuan ke berbagai pihak. Saat AS tidak mau memberi





Indomiliter

dukungan, maka Soekarno beralih ke blok timur. Ternyata, Uni Soviet bersedia melakukan perjanjian jual beli senjata besar-besaran dengan Indonesia, senilai US\$ 2,5 miliar dengan pola pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini Indonesia berani mengklaim telah memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan.

Bermodal angkatan perang yang kuat dan 'dukungan' dari blok timur, Soekarno pun maju bernegosiasi dengan pihak AS. John F. Kennedy yang baru menjabat sebagai Presiden AS waktu itu ternyata cukup khawatir dengan pergerakan Soekarno. Walaupun agak ragu, Kennedy waktu itu mau tak mau harus mendukung Soekarno. Karena memanasnya iklim Perang Dingin ketika itu, muncul kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. Indonesia pun muncul sebagai kekuatan yang diperhitungkan keberadaannya oleh blok barat maupun blok timur. "Melalui perhitungan-perhitungan yang dilakukan Amerika dan dampaknya terhadap Asia Tenggara,

Kennedy mengambil tindakan dengan memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian barat kepada Indonesia dengan tidak melalui jalan perang, tetapi menggunakan perundingan," tutur Anhar Gonggong.

Selanjutnya, tercapailah persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani di markas besar PBB di New York, pada tanggal 15 Agustus 1962. Isinya Belanda menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada badan otorita PBB (UNTEA). Kemudian UNTEA menyerahkan Papua barat ke Indonesia. Berkat kepiawaian diplomasi dan pemahaman geopolitik internasional yang kuat dari para pemimpin Indonesia, Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia tanpa perlu terjadi peperangan besar.

### **Konfrontasi Dengan Federasi Malaysia**

SEBAGAI BAGIAN dari penarikan diri dari daerah koloninya di Asia Tenggara, pada 1961 Inggris mencoba menggabungkan dua koloninya di Kalimantan dengan di Semenanjung Malaya, dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini

secara tegas ditentang oleh Pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Federasi Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di Asia Tenggara. Soekarno juga menganggap Federasi Malaysia merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru yang dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. "Soekarno menentang dengan alasan bahwa ini adalah

proyek Neokolim (neo kolonialisme dan imperialism) Inggris," papar Dr. Anhar Gonggong.

Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio pada 20 Januari 1963 mengeluarkan pengumuman bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Sekali lagi Indonesia menyebabkan kondisi geopolitik di kawasan Asia Tenggara memanas. Simak saja. Pada 12 April 1963 sukarelawan Indonesia masuk ke Malaysia untuk melakukan penyerangan dan sabotase ke pihak Malaysia. Ini, kemudian memicu demo anti Indonesia di Kuala Lumpur. Pada puncaknya peserta demo ini sampai merobek foto Soekarno dan bahkan peserta demo membawa Garuda Pancasila ke depan Perdana Menteri Malaysia saat itu untuk menginjak lambang negara Indonesia itu.

Peristiwa ini menyebabkan kemarahan Soekarno, sehingga ia meluapkan amarahnya melalui pidato "Ganyang Malaysia" pada 27 Juli 1963. Pada bulan Mei 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah Malaysia. Tentara Malaysia yang berhadapan dengan Indonesia



justru sedikit. Yang lebih banyak terlibat konflik bersenjata dengan Indonesia justru adalah tentara Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus Special Air Service (SAS).

Berikutnya, PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Merespon itu, Indonesia melakukan tindakan berani yaitu keluar dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. Bahkan Indonesia malah makin berupaya menunjukkan eksistensinya di skala internasional dengan membentuk Konferensi Kekuatan Baru atau Conference of New Emerging Forces (CONEFO). Tak hanya itu, Soekarno juga menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan Olimpiade. Kejuaraan ini diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963 dan sukses diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.

Namun, karena permasalahan ekonomi dan politik di dalam negeri kepemimpinan Soekarno jatuh pada 1965 dan digantikan oleh Soeharto. Sejak itu, keinginan Indonesia untuk berkonfrontasi dengan Malaysia berkurang, dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus 1966 dan konfrontasi secara resmi usai.

### Era Orde Baru

SETELAH SOEKARNO jatuh dan digantikan oleh Soeharto, maka di Indonesia terjadi pembalikan. Jika sebelumnya Indonesia secara geopolitik dekat dengan blok timur terutama Uni Soviet, kini



oleh Soeharto Indonesia dibawa berdamai dengan blok barat, terutama Amerika Serikat. Jika sebelumnya Indonesia memperoleh bantuan pinjaman dari Uni Soviet untuk pembelian persenjataan, pada masa orde baru Indonesia mendapatkan kucuran pinjaman dana dari negara-negara blok barat, serta lembaga-lembaga internasional besutan blok Barat. Penggunaan pinjaman ini terutama adalah untuk pembangunan ekonomi.

Di era ini Indonesia memprakarsai berdirinya ASEAN, bersama Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura pada Agustus 1967. Asosiasi negara-negara Asia Tenggara ini awalnya dibentuk untuk meredakan rasa curiga dan konflik antara negara-negara Asia Tenggara. Selanjutnya, ASEAN berkembang menjadi wadah kerja sama negara-negara Asia Tenggara

dalam berbagai bidang, yaitu dari politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pada era ini, berhasil dirumuskan pemahaman geopolitik Indonesia yang dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan nusantara ialah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah, dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

### Pengakuan Negara Kepulauan secara Internasional

PADA KONFERENSI Hukum Laut Internasional di Den Haag, Belanda tahun 1958, ditetapkan bahwa batas wilayah laut setiap negara adalah sejauh 3 mil laut dari



srikandipp.com

daratan. Dasarnya waktu itu adalah sejauh tembakan meriam atau *cannon* kala itu yang hanya mencapai jarak 3 mil. Putusan internasional ini lalu pada 1939 diadopsi oleh Belanda ke Indonesia yang ketika itu masih menjadi jajahan Belanda. Akibatnya, wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan menjadi terpecah-pecah, terpisahkan oleh batas teritorial laut.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah berupaya mendefinisikan secara jelas wilayah perbatasan Indonesia dengan gagasan menyatukan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka, pada 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa batas-batas wilayah perairan

Indonesia adalah sejauh 12 mil laut, diukur dari titik-titik pulau terluar. Kemudian, keputusan Indonesia ini diajukan ke Konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958 di Jenewa. Namun, usulan tersebut ditolak oleh negara-negara maritim besar karena konsep “kepulauan” dan “negara kepulauan” yang diadopsi Indonesia dianggap sebagai paradigma baru. Hingga tahun 1960-an Indonesia masih belum mendapatkan kemajuan berarti dalam upaya memperoleh pengakuan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Baru di era pemerintahan Orde Baru terlihat kemajuan dalam hal teritorial laut ini. Hingga tahun 1980, setidaknya ada 12 perjanjian perbatasan yang melibatkan

Indonesia dengan enam negara tetangga sebagai bentuk penegasan yurisdiksi wilayah kelautan. Tidak hanya itu, pada 21 Maret 1980 pemerintah menggulirkan klaim terhadap wilayah perekonomian laut melalui Deklarasi Zona ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Jauhnya, selebar 200 mil diukur dari garis dasar laut wilayah Indonesia.

Perhatian yang besar dari Orde Baru ini terutama atas dasar kepentingan eksplorasi sumber daya lepas pantai demi menjalankan pembangunan ekonomi. Hingga akhirnya pada 30 April 1982 berbagai upaya itu membawa hasil menggembirakan. Wilayah kedaulatan laut Indonesia diterima dan diakui oleh Konferensi Hukum Laut II PBB di New York AS. ●





*Indonesia di Tengah Dinamika*  
*Geopolitik Global*

**R**esesi geopolitik. Itulah tajuk laporan perkiraan tahunan resiko politik (*political risks*) yang dikeluarkan oleh Euroasia Group, perusahaan konsultan global yang menganalisa resiko politik. Menurut firma milik ahli geopolitik Ian Bremmer ini, tahun 2017 merupakan awal periode terjadinya resesi geopolitik global. Resesi mengarah ke kondisi absennya pemimpin global, atau disebut dengan G-Zero World. Tidak ada lagi negara adikuasa yang dominan. Disebutkan dalam laporan tahunan tersebut, meskipun tidak memicu konflik militer antar negara, tetapi tahun ini resesi geopolitik berdampak pada melemahnya arsitektur keamanan dan ekonomi internasional, serta meruncingnya ketidakpercayaan diantara negara kuat.

Dinamika geopolitik global tentu akan memberi dampak bagi Indonesia, sebagai negara yang secara geografis berada pada posisi pertemuan dua benua dan dua samudera. Bagaimana Indonesia menyikapi fenomena geopolitik global ini?

### Geopolitik dalam Konteks

Geopolitik itu kontekstual. Jika ditanya tentang geopolitik, beragam jawaban akan ditemukan. Konsep geopolitik mempunyai definisi yang luas dan longgar. Lingkup geopolitik bisa mencakup pandangan dalam memandang sebuah negara, interaksi antara negara, interaksi antar sekelompok negara, atau situasi/penyelenggaraan politik internasional. Yang menjadi kunci dalam istilah ini adalah kekuatan politik, kedaulatan (*sovereignty*) dan keamanan negara (*national security*), serta variabel-variabel geografis seperti sumber daya alam, posisi daratan, iklim, laut, populasi, dan unsur geografi lainnya. Geopolitik erat kaitannya dengan politik luar negeri dan kepentingan nasional.

Secara konsep, hubungan antara “geo” yang merujuk pada geografi dan politik telah dipelajari sejak zaman Aristoteles (384-322 SM) hingga Montesquieu (1689-1745) yang berargumen

tentang pengaruh kondisi geografis (topologi, iklim, posisi, dan jangkauan) terhadap manifesto politik sebuah entitas. Mengutip Makmur Supriyatno (2014) dalam bukunya “Tentang Ilmu Pertahanan”, geopolitik penting untuk dipahami dalam konteks kesejarahan, geografi, politik, dan strategi, terutama dalam melihat penggunaan konsep tersebut dari zaman ke zaman, yang terkadang tidak saling bersambungan dalam penggunaannya.”

Meskipun tidak menyebutkan istilah geopolitik, telah mengemuka tulisan-tulisan masyhur pada akhir abad 18 hingga abad 19 yang berkaitan dengan



FRIEDRICH RATZEL

politik internasional dan geografi seperti Carl Von Clausewitz (1832) dengan konsep “*war is the continuation of politics by other means*” (red-baca:proyeksi kekuatan), Alfred T Mahan dengan bukunya “*The Influence of Sea Power Upon History*”, Halford Mackinder dengan konsep *heartland*, dan Nicholas Spykman dengan konsep *rimland*. Terdapat pula sederetan nama seperti John Seeley, Karl Haushofer, Friedrich Ratzel, H.G. Wells, Homer Lea, Frederick Teggart, Frederick Jackson Turner, James Burnham, hingga E.H. Carr yang membahas materi (unsur geografi) dalam konflik kepentingan (*conflict interest*) dan perebutan kekuasaan (*struggle for power*) antar negara dalam politik internasional.

Secara istilah, geopolitik pertama kali

dicetuskan oleh ilmuwan politik Swedia Rudolf Kjellen di akhir abad 19, yang mendapat pengaruh dari koleganya Friedrich Ratzel, pakar geografi Jerman yang mengkonseptualisasikan negara sebagai organisme berkembang dan memerlukan ruang hidup (*lebensraum*). Beranjak dari argumen ini, Kjellen berasumsi negara modern lainnya sebuah organisme hidup yang berkembang dan kemudian mati. Tercetuslah geopolitik, sebuah masalah dan kondisi dalam negara yang muncul dari lanskap geografisnya (Ensiklopedia Britannica, 2006). Pemikiran geopolitik awal ini, yang berkembang akhir abad 18 hingga awal abad 20 disebut geopolitik klasik. Geopolitik klasik mengedepankan perluasan teritorial (ekspansi ruang hidup) dan pengusahaan sumber daya untuk mengatasi permasalahan geopolitik masing-masing negara. Kolonialisme, Perang Dunia I dan II merupakan bukti adanya pengaruh kuat karya termuka ini dalam geopolitik dunia yaitu perluasan wilayah dengan penjajahan dan perang memperebutkan sumber daya. Impresi ekspansionis agresif geopolitik klasik ini terkesan negatif sekarang ini (red-bertentangan dengan fenomena kerja sama dan internasionalisme kini).

Pasca Perang Dunia II, popularitas teori geopolitik menurun. Istilah ini kembali populer pada akhir tahun 1970-an dengan konteks yang berbeda. Henry Kissinger, memunculkan kembali penggunaan geopolitik dalam nuansa Perang Dingin. Dalam bukunya “*The White House Years*” (1979), geopolitik didefinisikan sebagai sebuah pendekatan (red-dalam politik internasional) yang menekankan pada kebutuhan keseimbangan. Ini merujuk pada peran dan kepentingan Amerika Serikat dalam percaturan politik global dengan menggunakan keseimbangan kekuatan politik (*balance of power*). Colin Gray mengkaji geopolitik dalam konteks Perang Dingin dalam “*The Geopolitics of Nuclear Era*” dan “*The Geopolitics of Super Power*” yang menggambarkan kompetisi perebutan pengaruh berbagai kawasan antara dua negara adidaya melibatkan teknologi (red-nuklir) di dalamnya. Gray berpendapat geopolitik



merupakan hubungan kekuatan politik internasional dalam pemetaan kawasan, yang menghasilkan perang proksi antara dua negara adidaya.

Berakhirnya Perang Dingin menandai adanya perubahan dalam konteks geopolitik menjadi lebih luas. Amerika sebagai *sole superpower*, istilah “geo” yang diartikan dengan potensi konflik antar negara dan perebutan pengaruh/kekuasaan, bergeser dengan dominannya kebutuhan akan perniagaan dan perdagangan. Menurut Edward Lutwakk (1990), geopolitik bukan hanya sekedar kekuasaan, tetapi juga ada kepentingan ekonomi di dalamnya. Globalisasi lebih populer. Kerja sama dan perdagangan bebas menandai fenomena kekuatan geopolitik berhubungan dan berkorelasi untuk memakmurkan negerinya masing-masing.

Gerard Toal (Gearoid Tuathail) dan John Agnew (1992) melihat geopolitik pasca Perang Dingin sebagai geopolitik kritis (*critical geopolitics*), yang menyebut geopolitik sebagai wacana dan praktik bagaimana aktor-aktor membentuk ruang (*spatialize*) dalam politik internasional dan melabelkan sebuah wilayah. Istilah seperti negara ketiga (*third world*), negara berbahaya (*rogue state*), atau tirai besi (*iron curtain*) merupakan wacana yang dibentuk oleh kekuatan dominan dengan melabelkan suatu wilayah untuk kepentingan nasional dan politik luar negerinya.

Meskipun interaksi antar negara diwarnai dengan kerja sama ekonomi, geopolitik dalam konteks ekspansionisme (perluasan) secara halus -tanpa menjajah tapi mempunyai kontrol terhadap akses-ternyata tetap dibutuhkan. Argumen Saul Cohen (2009) memandang bahwa ada beberapa kawasan yang tidak mampu dijamah oleh kapitalisme dan tidak dapat dikelola dengan baik meski memasuki era globalisasi (*shatterbelt*), sementara kawasan ini memiliki sumber daya yang melimpah. Robert Kaplan juga menegaskan bahwa geografi masih menjadi penentu arah dalam mendefinisikan geopolitik. Ekspansionisme secara halus bukan dengan menduduki suatu wilayah,

tetapi dengan mempunyai akses dan pengaruh di wilayah tersebut (kontrol kebermanfaatannya atas suatu ruang). Lebih lanjut, Cohen juga mengenalkan konsep zona *shatterbelt-gateways* dan *ecumene-effective territory-empty areas* yang menunjukkan relevansi pengaruh antropologis-geografis dalam geopolitik seperti fenomena arus pengungsi dari negara konflik atau dari negara miskin ke negara maju.



### Resesi Geopolitik

Merujuk pada berbagai konteks geopolitik, sepanjang sejarah dinamika geopolitik, negara adidaya akan selalu memproyeksikan kekuatannya. Absennya kekuasaan (*vacuum of power*), akan menciptakan lebih banyak geopolitik atau turbulensi dalam geopolitik ke arah yang tidak terprediksi.

Resesi geopolitik, merujuk pada peristiwa resesi ekonomi global tahun 2008, ditafsirkan dalam konteks adanya tren arus balik dalam politik internasional. Negara-negara cenderung ke arah isolasionis - proteksionis. Globalisme, regionalisme, dan institusionalisme yang dirintis sejak tahun 1945 mulai melemah. Tidak ada lagi “pemimpin” dunia (G Zero Worlds merujuk ke negara atau blok/alianasi) berpengaruh secara politik, ekonomi, dan militer yang mendorong, menginisiasi, atau berpengaruh kuat dalam agenda kemaslahatan internasional. Fenomena ini dapat memicu ketegangan dan sensitivitas antar negara dalam hal

politik, ekonomi, maupun agenda perubahan iklim.

Seperti dilansir Euroasia Group, hampir seluruh kawasan di dunia dari segi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi mengarah ke tren yang belum pernah sebelumnya terjadi dalam sejarah. Semboyan America First dan Make America Great Again mengindikasikan kebijakan Donald Trump untuk merdeka dari tanggung jawabnya atas

perannya yang sangat diperlukan dalam menangani isu internasional selama ini. Amerika menjadi proteksionis, bertentangan dengan perdagangan bebas yang dipromosikan Amerika sendiri sebelum era Trump. Guru Besar Emiritus Universitas Indonesia Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti menyatakan kebijakan Trump yang tak sepaham lagi dengan globalisasi ekonomi. AS yang sebelumnya merupakan salah satu motor utama liberalisasi ekonomi dunia, kini justru mengambil kebijakan proteksionisme.

Seperti dinyatakan oleh pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti, kebijakan proteksionisme Trump dengan rencana menerapkan tarif yang besar untuk barang dari Tiongkok yang akan masuk ke AS. “Bila ini dilakukan, dampaknya akan sangat luar biasa,” ucap Ikrar. Menurut Ikrar, selama ini hubungan ekonomi-politik AS dan Tiongkok sudah sangat terintegrasi, perdagangan kedua negara pun sudah terjadi interdependensi. Kemungkinan



besar tindakan itu akan dibalas oleh Tiongkok. “Akibatnya, akan terjadi gonjang-ganjing ekonomi internasional dan akan berdampak pada negara lain,” tutur Ikrar. Tiongkok sendiri semakin menunjukkan reaksi yang berlebihan. Transisi kepemimpinan di Tiongkok tahun ini diwarnai dengan sensitivitasnya dalam menghadapi tantangan eksternal yang mengganggu kepentingan nasional Tiongkok, terutama konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Pasca Brexit, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah keuangan Uni Eropa semakin kompleks, sementara Jerman juga belum menunjukkan kepemimpinan. Integrasi kawasan secara penuh sepertinya bukan bentuk ideal dalam mencapai kemakmuran bersama. Menurut Ikrar Nusa Bhakti, secara politik, Brexit menunjukkan bahwa perkembangan integrasi kawasan tak semulus yang dulu diperkirakan oleh banyak kalangan. Setelah Inggris, bukan tidak mungkin Prancis juga akan mengikuti untuk keluar dari Uni Eropa. Belum lagi, Uni Eropa menghadapi masalah pengungsi dan isu dalam negeri masing-masing negara seperti memanasnya pemilu di Perancis dan referendum di Italia.

Teknologi juga berpengaruh kuat dalam perkembangan geopolitik seperti *Arab Spring* yang masih menyisakan konflik berkepanjangan hingga kini di beberapa negara Timur Tengah dan “perlawanan” Silicon Valley atas kepresidenan Trump. Dan, untuk pertama kalinya dalam

sejarah, bank sentral di negara maju kehilangan independensinya.

Tidak bisa dipungkiri, perubahan lanskap politik internasional berubah seiring dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Dinamika ini mempengaruhi cara negara berinteraksi dalam lingkungan strategisnya.

### **Penguasaan Akses Sumber Daya Alam**

Kontestasi geopolitik, apapun konteksnya, muaranya adalah perebutan kekuasaan dan kepentingan nasional. Pemaknaan terhadap pembentukan ruang (*spatialization*) dalam politik internasional ditujukan untuk keberlangsungan hidup sebuah negara, yang mau tidak mau, berhubungan dengan sumber daya alam. Negara tidak dapat menolak variabel geografisnya. Teritori, lanskap, iklim, lautan, populasi, dan kebudayaan merupakan sumber daya yang diberikan oleh Tuhan (*given*). Unsur geografi tersebut dapat menjadi kekayaan sekaligus kelemahan sebuah negara, yang tergantung perspektif pemimpin politik dalam mengelolanya.

Sepanjang sejarah, konflik antar negara, kolonialisme, maupun neokolonialisme bertujuan untuk memenuhi sumber daya yang belum dimiliki (*zero/negative sum game*). Sementara itu, filosofi kerja sama antar negara adalah untuk saling bertukar sumber daya yang dimiliki (*positive sum game*). Dapat dikatakan secara praktik, geopolitik

adalah tindakan rasional dalam konteks kondisi geografi. Pemilihan Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri AS, mengindikasikan adanya dominasi kepentingan energi dalam kebijakan politik luar negeri Trump, seperti yang dikatakan Deputi Pengendalian Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Parulian Sihotang. Lanjut Parulian, mayoritas sumber energi migas hanya terkonsentrasi di negara-negara Timur Tengah sementara negara yang membutuhkan migas ini banyak sekali, utamanya negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Eropa dan Cina. Inilah yang membuat akhirnya terjadi kompetisi dari negara-negara untuk memperebutkan sumber-sumber migas yang hanya ada di negara-negara tertentu.

Magnet sumber daya alam ini tidak hanya menarik negara-negara, tetapi juga masyarakat. Kemunculan kekuatan aktor non negara seperti kelompok ISIS yang menguasai sumber minyak di Irak atau kartel narkoba di Meksiko menunjukkan bahwa geopolitik bukan monopoli negara saja. Aktivitas transnasional lintas batas geografis (penyebaran ideologi dan kekerasan) yang mereka lakukan menjadi ancaman bagi negara. Belum lagi fenomena migrasi dari negara miskin/berkembang ke sesama negara berkembang/maju yang didasari karena terbatasnya akses terhadap sumber daya lokal. Wilayah yang maju dengan infrastruktur dan perekonomian yang baik, memancing para imigran seperti kasus pengungsi Suriah, Rohingya, dan imigran Meksiko. Menurut Fitriana Nur dari International Organization for Migration, gelombang pengungsi ini membawa permasalahan tersendiri bagi negara-negara penerima, diantaranya adalah masalah sosial dan perebutan akses sumber daya dengan penduduk asli.

### **Geopolitik Rasa Indonesia**

Peletak dasar geopolitik Indonesia adalah Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pandangan yang mendalam dan pergaulannya yang cukup luas,



di tengah dinamika situasi dunia saat itu berpengaruh pada pemikirannya dalam membangun Indonesia pasca kemerdekaan. Salah satunya adalah gagasannya tentang geopolitik Indonesia. Soekarno paham betul bahwa posisi silang (*cross position*) Indonesia, antara dua benua dan dua samudera, akan berdampak pada keberlangsungan negara Indonesia. Seperti dijelaskan Hendrajit, Peneliti Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan geopolitik yang strategis dalam interaksi global. Posisi geografisnya yang berada di antara dua samudera dan dua benua yang merupakan peluang besar yang bisa dimainkan di panggung internasional.

Jika ingin menjadi bangsa besar, Indonesia harus mengetahui geopolitiknya. Menurut Soekarno, Indonesia sebagai satu kesatuan adalah geopolitik Indonesia. “Kenapa bangsa Indonesia itu jang terdiri daripada suku-suku bermatjam-matjam, tapi toh mempunjai satu perasaan natie. Kenapa rakjat Indonesia itu kulturnja kok ada tjorak Islamietisch, ada tjorak Hindu, ada tjorak Tionghoa, ada tjorak zuiver Indonesisch, itupun ilmu geo-politik. Orang tidak bisa menjusun pertahanan nasional jang kuat, orang tidak bisa membangun satu bangsa jang kuat, sebagai satu bangsa, negara jang kuat, kalau tidak dengan pengetahuan geopolitik” (Pidato Soekarno, 20 Mei 1965). Konteks geopolitik Indonesia adalah mempertahankan Indonesia sebagai satu kesatuan, memakmurkan rakyatnya dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya, dan berinteraksi dengan negara lain (red-baca: politik luar negeri) berdasarkan kepentingan Indonesia tersebut.

Hasil penggalian pengetahuan Soekarno tentang geopolitik Indonesia adalah Pancasila. “Maka oleh karena itu ketahuilah, ketahuilah kondisi tanah-air kita, geo-politik tanah-air kita. Geo-politik ialah pengetahuan keadaan, pengetahuan segala sesuatu berhubungan dengan geografische constellatie daripada sesuatu negeri.

Tadi telah disebut Pantjasila adalah hasil daripada pengetahuan geopolitik” (Pidato Soekarno, 20 Mei 1965). Pancasila merupakan cerminan kepentingan nasional sekaligus dasar dalam pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam geopolitik Indonesia.

Geopolitik diperlukan untuk membangun ketahanan nasional (ketahanan nasional sebagai suatu kondisi). Menurut Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional (padnas) Lemhannas RI I Putu Sastra Wingarta, untuk mewujudkan ketahanan nasional harus dilakukan berdasarkan pemikiran



geostrategi yaitu sebuah konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia (ketahanan nasional sebagai konsepsi). Kita harus mengetahui gambaran dan karakteristik bangsa kita sendiri, sehingga lahirlah wawasan nusantara (wasantara) sebagai geopolitik Indonesia. Dengan wasantara, pengambilan kebijakan politik harus mengedepankan persatuan-kesatuan dan kepentingan masyarakat Indonesia, dengan melihat peluang, tantangan, dan ancaman dalam lingkungan strategis regional dan global.

Sayangnya, menurut Hendrajit, setelah era Soekarno, kesadaran geopolitik Indonesia mengalami pendangkalan. Akibatnya, bangsa ini tidak mampu

mengenali kekuatannya sendiri, sehingga sangat rentan untuk menjadi sasaran untuk dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain. Ujungnya, ketahanan nasional Indonesia melemah. Hendrajit pun berpendapat, untuk mengatasi hal itu Indonesia harus mempunyai satu skema yang jelas untuk melawan skema buatan negara asing. Penyusunan skema itu, dimulai dari pemahaman terhadap kekuatan geopolitik Indonesia.

### Indonesia di dalam Pusaran Geopolitik Global

Bagaimana Indonesia menyikapi perkembangan geopolitik global yang mengalami resesi? Bagaimana membangun kekuatan geopolitik Indonesia untuk mencapai kebermamanan maksimal dalam situasi geopolitik global saat ini? Yang pertama adalah para pengambil kebijakan harus mempunyai kesadaran penuh tentang geopolitik Indonesia berupa pemahaman terhadap kondisi Indonesia dan kemampuan untuk mengelola segala sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Hendrajit berpendapat, “Tanpa pemahaman diri yang baik, dan pengetahuan tentang cara mengelola keunggulan diri sendiri yang tepat di dalam interaksi dengan dunia internasional maka Indonesia tak akan bisa menjadi negara besar yang disegani di panggung internasional”.

Dengan sumber daya alamnya yang melimpah, namun belum mampu menjadikan Indonesia negara kaya/maju. Sumber daya alam Indonesia justru menjadi kelemahan dalam percaturan politik internasional sehingga merugikan bangsa Indonesia sendiri. “Bangsa ini tidak mampu mengelola letak kestrategis-an posisi dan kekayaan alam yang dimilikinya, secara tepat dan baik,” papar Hendrajit. Pengetahuan geopolitik diperlukan untuk melakukan hal ini.

Geopolitik Indonesia tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, tetapi dari berbagai aspek seperti rumusan gatra dalam ketahanan nasional yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut Hendrajit, dalam sebuah kerja sama

dengan negara lain, secara geopolitik selain dilihat dari aspek ekonomi, rencana kerja sama juga ditinjau dari aspek lainnya, misalnya dari aspek geografis, politik, atau pertahanan dan keamanan.

Dampak tidak adanya pemahaman geopolitik Indonesia adalah kondisi ketahanan nasional Indonesia yang menurut hasil pengukuran

Indonesia, atau pemanfaatan Indonesia oleh kepentingan kekuatan asing. Seperti dikatakan Ikrar, masyarakat Indonesia harus memiliki nalar sehat, dan jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang mudah memecah belah bangsa. “Ini saatnya kita sadar jangan hanya mendapatkan uang dari asing lantas menjadi budak asing dan menjual negara,” pungkas Ikrar. Hal senada

yaitu letak geografi yang sangat strategis yaitu sekitar 40% dari pelayaran perdagangan dunia setiap tahunnya melewati perairan Indonesia, terutama Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Parulian menambahkan, Indonesia harus melihat peluang dalam hal migas. Indonesia harus segera mencari investor untuk melakukan eksplorasi migasnya. Investasi di sektor migas saat ini tengah murah, karena harga yang terpuruk. Harga investasi yang sedang turun harusnya bisa jadi kemudahan tersendiri untuk berinvestasi di bidang eksplorasi migas di Indonesia.

Indonesia juga harus waspada terhadap kekuatan aktor non negara yang semakin menguat. Ideologi asing yang mereka sebar dan praktik perdagangan ilegal berupa narkoba dan perdagangan manusia, harus mendapatkan perhatian. Permasalahan yang ditimbulkan oleh aktor non negara ini membutuhkan penanganan yang lebih kompleks karena tidak berwujud otoritasnya. Diungkapkan Fitriana Nur, perempuan Indonesia rentan menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, Indonesia juga menjadi tempat transit pengungsi Rohingya. Kuncinya, menurut Fitriana adalah manajemen perbatasan yang baik.

Di tengah geopolitik global yang tengah resesi dan menguatnya kekuatan aktor non negara dalam geopolitik membuat pengambil kebijakan dan masyarakat Indonesia harus menyiapkan diri dan paham akan geopolitik Indonesia. Pengambil kebijakan harus menyiapkan diri agar segala potensi dan keberuntungan geopolitik ini bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Sementara, masyarakatnya harus memiliki nalar dan akal sehat dalam menanggapi isu yang beredar. Dengan begitu, Indonesia akan mampu mempertahankan kesatuan dan membangun kekuatan geopolitiknya sehingga ketahanan nasional ini akan semakin tangguh. (vs)



Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI berada pada kondisi kurang tangguh. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya gatra ideologi. Lemahnya pemahaman pengambil kebijakan akan nilai geopolitik dalam Pancasila memberi pengaruh terhadap instabilitas di beberapa wilayah Indonesia, mudah masuknya penetrasi ideologi asing, dan perekonomian nasional yang masih menyisakan PR besar. Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, seperti yang dituturkan oleh I Putu Sastra Wingarta, dapat menjadi resep untuk melakukan revitalisasi kebijakan.

Di tengah situasi resesi geopolitik global saat ini, Indonesia harus menyadari tentang geopolitiknya dan melakukan pembenahan. Menurut Ikrar Nusa Bhakti, Indonesia yang memiliki berlimpah kekayaan alam dan sumber energi dan juga merupakan jalur penting distribusi pasokan energi dunia harus waspada terhadap incaran kekuatan asing. Incaran untuk menguasai

juga diungkapkan Parulian Sihotang. Menurutnya pergeseran geopolitik ini selain perlu diwaspadai juga memberi peluang bagi Indonesia.

Inilah yang mesti direalisasikan untuk membangun kekuatan geopolitik Indonesia. Lanskap geografis dan sumber daya alam harus dikelola dengan baik berdasarkan pemahaman geopolitik Indonesia. Menurut Dorodjatun Kuntjoro Jakti, keunggulan Indonesia adalah negeri ini memiliki banyak variasi komoditi yang bisa diperdagangkan di dunia, mulai dari aneka rempah-rempah, berbagai hasil perkebunan, sampai LNG. Untuk meminimalisir dampak negatif dari pergeseran ekonomi dunia ke depan, yang paling mendasar adalah bangsa Indonesia harus memperkuat pondasi perekonomian domestiknya. Indonesia juga harus fokus membenahi industri nasional, terutama manufaktur sehingga mampu mengeksport barang jadi, bukan hanya komoditas.

Selain itu, Indonesia juga harus memanfaatkan keberuntungan lainnya,



# Memfaatkan Geopolitik Indonesia



Hendrajit

Indonesia merupakan negara yang kaya raya, kaya akan ragam hayati maupun botani, kaya akan sumber energi maupun mineral bumi, kaya karena berada pada kondisi topografis ideal dan posisi persilangan wilayah antar bangsa-bangsa yang strategis. Namun, bila bangsa Indonesia sendiri tidak memahami konteks apa saja yang menjadi kekayaan negaranya, niscaya akan menjadi objek permainan bagi kepentingan negara bangsa-bangsa lain. Kekayaan yang sangat mahal ini, tentunya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia bagi semua generasi. Ironinya, kekayaan ini bisa-bisa “tergadaikan” kepada bangsa-bangsa lain oleh kepentingan jangka pendek segolongan masyarakat tertentu saja. Sehingga, tanpa kita sadari manfaat kekayaan serta

beraneka lagi melimpah ruah. “Tetapi, bangsa ini tidak mampu mengelola letak ke-strategis-an posisi dan kekayaan alam yang dimilikinya, secara tepat dan baik,” papar Hendrajit.

Tanpa pemahaman diri yang baik, dan pengetahuan tentang cara mengelola keunggulan diri sendiri yang tepat di dalam interaksi dengan dunia internasional maka Indonesia tak akan bisa menjadi negara besar yang disegani di panggung internasional. Nah, pemahaman diri (dalam hal ini adalah mengenai keunggulan geografis, kekayaan alam, dan kekayaan budaya), dan lingkungan sekeliling yang baik hanya bisa dicapai melalui pengetahuan geopolitik.

Jadi apakah geopolitik itu? Secara etimologi, geopolitik berasal dari kata “geo” dari bahasa Yunani yang berarti

keunggulan geografis bangsa Indonesia telah berpindah menjadi bagian dari kemakmuran milik bangsa lain. Sedangkan bangsa kita, dari waktu ke waktu, hanya bisa gigit jari dan menyesalinya.

Seperti dijelaskan Hendrajit, Peneliti Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan geopolitik yang strategis dalam interaksi global. Posisi geografisnya yang berada di antara dua samudera dan dua benua yang merupakan peluang besar yang bisa dimainkan di panggung internasional. Tambahkan lagi, Indonesia memiliki kekayaan alam

bumi yang menjadi ruang wilayah untuk kehidupan. Sedangkan politik dari kata “polis” yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan “teia” yang berarti urusan. Frederich Ratzel, ilmuwan asal Jerman yang pertama mengenalkan ilmu geopolitik ini dengan istilah ilmu bumi politik (*political geography*). Lalu, Rudolf Kjellen juga dari Jerman, menyebutnya sebagai *geographical politic* dan disingkat geopolitik.

Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah politik atau hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geografi. Geopolitik, dapat pula diartikan sebagai suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mempunyai empat unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijakan pemerintah suatu negara, yang kesemuanya tentu saja diorientasikan dalam rangka menjamin kepentingan nasional bangsa itu sendiri.

## Geopolitik Indonesia

Ada contoh kasus yang menarik terjadi pada Januari 2017 lalu. Tepatnya pada tanggal 16 Januari 2017 Sultan Tidore, Husain Sjah, menuliskan surat terbuka untuk Presiden RI Joko Widodo dan menyatakan dengan halus bahwa pihaknya merasa keberatan atas rencana kerja sama Pemerintah RI dan Jepang di Morotai. Dalam surat terbukanya itu, Husain Sjah mempertanyakan apakah kerja sama yang dilakukan itu telah melalui pertimbangan yang menyeluruh? Baik dari sisi ekonomi, politik dan budaya, pertahanan keamanan serta harkat dan martabat bangsa?



Wallup.net

Seperti diketahui, sebelumnya Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, secara terpisah sudah menyampaikan rencana kerja sama RI dengan Jepang di Morotai. Menurut Susi, Jepang akan melakukan investasi di beberapa bidang di Morotai, antara lain di industri perikanan, *cold storage*, dan pasar budidaya. Selain itu Jepang juga akan berinvestasi di bidang resor wisata di Morotai.

Di lihat dari sudut pandang ekonomi, investasi ini tentu menguntungkan kedua pihak. Perekonomian di wilayah Morotai dan Maluku Utara jelas akan meningkat. Apalagi, Jepang adalah pasar tuna terbesar di dunia. “Sekitar 90 persen pasar tuna larinya ke Jepang, dan Jepang (lokasinya) dekat dengan Morotai,” jelas Susi.

Pernyataan itu tidak salah. Namun, secara geopolitik selain dilihat dari aspek ekonomi, rencana kerja sama ini sebaiknya juga di tinjau dari aspek lainnya, misalnya dari aspek geografis, politik, atau pertahanan dan keamanan. Sebab, pihak Jepang menyatakan bahwa

pilihan investasinya ke Morotai juga dilatarbelakangi oleh faktor historis bahwa Jepang pada masa Perang Dunia Kedua dulu masuk ke Indonesia melalui Morotai. Hal ini dinyatakan oleh Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan. “Di Morotai ada tujuh lapangan terbang. Karena ini nostalgianya teman-teman dari Jepang, ingin membesarkan atau mengaktifkan satu lapangan terbang itu menjadi satu kawasan, dia mau kasih nama apa saja silakan saja. Nanti dia laporkan ke kita. Tapi semua perundang-undangnya itu berlaku dari pemerintah Indonesia,” jelas Luhut, Januari lalu.

Menurut Hendrajit, sejak dulu Jepang telah menyadari betapa strategis posisi Morotai dari sisi geografis. Baik sebagai pelabuhan penting untuk jalur perdagangan, jalur distribusi migas, dan bisa juga kemungkinan di masa depan dimanfaatkan sebagai pangkalan militer, yang semuanya itu sangat menguntungkan bagi kepentingan nasional Jepang. “Apakah hal tersebut diperhitungkan saat ini? Apakah yang diperhitungkan hanya dalam hal

ekonomi?” tutur Hendrajit.

Di sinilah, pentingnya memahami geopolitik Indonesia. Setidaknya, Indonesia memahami *bargaining position*-nya dengan bangsa-bangsa lain. Simak saja keunggulan Indonesia ketika ditinjau dari Trigatra yaitu gatra geografis, gatra kekayaan sumber daya alam, dan gatra kependudukan atau sumber daya manusia. Dari sisi gatra geografis, letak Indonesia di posisi silang yang sangat strategis, menghubungkan jalur pelayaran dunia baik dari utara ke selatan, maupun dari barat ke timur. Sekitar 40 persen pelayaran perdagangan di dunia harus melalui perairan Indonesia. Terutama selat Malaka dan selat Sunda, serta selat-selat lain seperti selat Lombok, selat Makassar, dan yang lainnya.

Setiap hari, sekitar 5 ribu kapal lalu lalang di selat Malaka. Dari 9 selat tersibuk di dunia, 4 diantaranya ada di Indonesia. “Bisa dipastikan bahwa negara-negara lain sebagai pengguna jalur strategis ini, memandang Indonesia secara geopolitik memiliki arti yang sangat vital dan strategis





worldmaritimeneews.com

bagi perdagangan internasional,” papar Hendrajit.

Lalu, dari gatra kedua, kekayaan sumber daya alam Indonesia begitu banyak, beragam, dan hampir merata di seluruh pulau dan perairan. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua, semua memiliki kandungan dan potensi kekayaan alam yang melimpah.

Sementara di gatra ketiga, yaitu kependudukan, Indonesia juga menyimpan potensi yang luar biasa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 257,9 juta jiwa. Selain itu, data Bank Dunia menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia terus tumbuh, dari nol persen penduduk pada tahun 1999 menjadi 6,5 persen pada 2011 atau setara dengan lebih dari 130 juta orang. Pada tahun 2030, jumlah kelas menengah diperkirakan akan melesat menjadi 141 juta orang. Ini semua merupakan potensi yang penting di bidang, produksi, distribusi dan konsumsi.

Tidak semua negara di dunia memiliki takdir geopolitik yang demikian kaya seperti Indonesia. Jika ini dipahami betul, maka Indonesia punya kekuatan unik di tengah dinamika geopolitik dunia. Hal ini

sebenarnya sudah disadari oleh Presiden pertama RI, Bung Karno. Buktinya, ketika berpidato pada pembukaan Lembaga Pertahanan Nasional pada 1965, Bung Karno menganjurkan agar kita sebagai anak bangsa mengetahui kondisi tanah air kita, geopolitik kita. Untuk bisa memanfaatkan kekayaan takdir geopolitik Indonesia, bangsa ini terlebih dulu harus memahami diri sendiri dulu.

Bermodalkan pemahaman geopolitik negeri ini, Bung Karno berani menggempur Belanda di Irian Barat dan “mempermainkan” Amerika Serikat. Ia memahami jika Irian Barat lepas maka Biak akan dimanfaatkan oleh Belanda atau blok Barat sebagai pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik. Ini, niscaya bakal mengancam kedaulatan Indonesia yang baru tumbuh. Maka Bung Karno pun menggandeng blok Timur sehingga mampu membuat Indonesia memiliki angkatan bersenjata terkuat di Asia Tenggara pada tahun 1961-1962. Setelah itu, dengan kekuatan diplomasi ia pun mampu menekan Amerika Serikat (AS) untuk meminta Belanda mundur dari Irian Barat lewat jalur damai. Dalam perhitungan AS, lebih

baik merangkul Bung Karno dari pada menelan resiko jika Indonesia masuk lebih dalam ke blok Timur.

Sayangnya, menurut Hendrajit, setelah Bung Karno lengser, kesadaran geopolitik Indonesia mengalami pendangkalan. Akibatnya, bangsa ini tidak mampu mengenali kekuatannya sendiri, sehingga sangat rentan untuk menjadi sasaran untuk dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain. Ujungnya, ketahanan nasional Indonesia melemah.

Hendrajit berpendapat, untuk mengatasi hal itu Indonesia harus mempunyai satu skema yang jelas untuk melawan skema buatan negara asing. Nah, penyusunan “skema perlawanan” Indonesia dimulai dari pemahaman terhadap kekuatan geopolitik Indonesia.

Negara yang mengenali kekuatan geopolitiknya, tidak hanya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk bertahan (*defensive*), tapi juga akan mampu mengambil langkah-langkah menyerang (*offensive*) yang juga efektif terhadap negara asing. Dengan demikian, Indonesia tidak akan goyah walaupun berada di tengah dinamika geopolitik global. ●

# Membaca Situasi *Geopolitik Dunia*

**T**ahun ini, geopolitik internasional sedang dalam kondisi tak menentu. Ini karena, di berbagai negara besar di dunia terjadi perubahan politik yang sangat signifikan. Perubahan politik di negara-negara besar ini selanjutnya membuat situasi politik dan ekonomi dunia di masa depan cukup sulit untuk diprediksi.

Salah satu perubahan yang paling besar adalah terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45. Betapa tidak. Sejak masa kampanye sosok Trump tampil kontroversial. Dan kini, di awal masa pemerintahannya ia pun telah mengambil beberapa kebijakan yang kontroversial. Dengan slogan “America First”, Trump menerapkan kebijakan *inward looking* yang proteksionis, baik dalam artian ekonomi, imigrasi, maupun politik.

Di sisi ekonomi, Trump langsung menerjemahkan kebijakan proteksionisme-nya dengan rencana menerapkan tarif yang besar untuk barang dari Tiongkok yang akan masuk ke AS. “Bila ini dilakukan, dampaknya akan sangat luar biasa,” ucap Pengamat Politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti.

Menurut Ikrar, selama ini hubungan ekonomi-politik AS dan Tiongkok sudah sangat terintegrasi. Di satu sisi AS punya investasi di Tiongkok, AS juga menjual obligasi ke Tiongkok, dan perdagangan kedua negara pun sudah terjadi interdependensi. Kalau AS memberlakukan beban bea masuk yang tinggi kepada produk dari negeri tirai bambu itu, maka kemungkinan besar tindakan itu akan dibalas oleh

Tiongkok. “Akibatnya, akan terjadi gonjang-ganjing ekonomi internasional dan akan berdampak pada negara lain,” tutur Ikrar.



Ikrar Nusa Bhakti

Lalu dari sisi imigrasi, kebijakan proteksionisme AS dilakukan Trump dengan menutup pintu masuk negerinya untuk imigran dari tujuh negara berpenduduk muslim. Padahal, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dasar masyarakat AS sendiri, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tak hanya itu. AS juga menutup pintu masuk bagi imigran asal Meksiko. Trump bahkan berencana akan membangun tembok besar di sepanjang 3.000 km perbatasan AS-Meksiko. Parahnya lagi, negara Meksiko yang diminta untuk membiayai pembangunan tembok itu.

Itu di AS. Di Eropa, kesatuan Uni Eropa sedang mengalami ujian.

Berdasarkan referendum di Inggris, negara itu memilih untuk keluar dari Uni Eropa dan ini akan menjadi masalah cukup besar bagi Inggris dan 27 negara Uni Eropa lainnya. Dari sisi anggaran ekonomi, pada 2016 Inggris memberi kontribusi anggaran ke Uni Eropa sebanyak 19,4 miliar euro, dan menerima sekitar 7 miliar euro dari subsidi regional dan pertanian Uni Eropa. Setelah Inggris keluar, maka negara-negara Uni Eropa lain harus mengisi kekurangan anggaran ini, paling kurang setengahnya. Selain itu, secara politik Brexit menunjukkan bahwa perkembangan integrasi kawasan tak semulus yang dulu diperkirakan oleh banyak kalangan. Setelah Inggris, bukan tidak mungkin Prancis juga akan mengikuti untuk keluar dari Uni Eropa.

Uni Eropa juga tengah mengalami masalah imigran dan pengungsi dari Timur Tengah. Untuk pertama kalinya sejak masa Perang Dunia kedua, Eropa harus menerima begitu banyak pengungsi asal Suriah hingga melebihi kemampuan negara-negara Eropa untuk menampung para pengungsi itu. Masalah ini pula yang menjadi salah satu pendorong masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa.

Selain itu, arena geopolitik dunia juga tengah bergeser dari wilayah Samudera Atlantik ke Samudera Pasifik. Ketegangan di Pasifik atau tepatnya di Asia Pasifik ketika Tiongkok mengklaim sebagian





getty images

besar wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari negaranya. Sejalan dengan menguatnya perekonomian Tiongkok, negeri tirai bambu ini juga mulai memperkuat militernya. Meski belum bisa menandingi kekuatan militer AS, namun Tiongkok telah berani memicu ketegangan di Laut Tiongkok Selatan Bahkan, meskipun masih disengketakan Tiongkok telah membangun pangkalan militer di kepulauan Spratly dan Paracel di wilayah perairan ini.

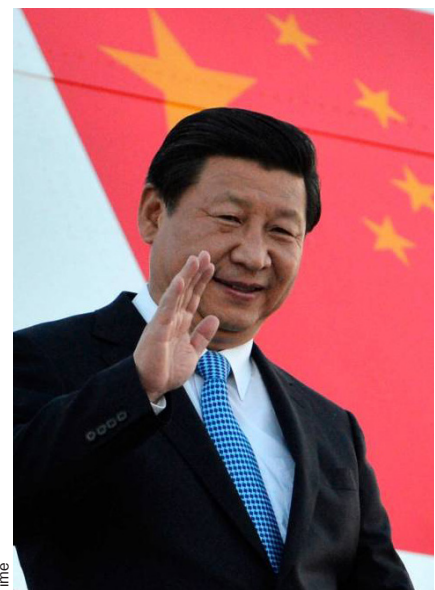
Namun, Ikrar Nusa Bhakti meragukan kekuatan Tiongkok ini. Tiongkok, menurut Dia, tidak mungkin menjadi sebuah kekuatan yang bisa menguasai dunia. Karena, Tiongkok tidak seperti Amerika yang memiliki kemewahan, dengan banyaknya sekutu AS di dunia. “Contohnya, kapal-kapal induk Amerika bisa berlabuh dimana saja, lain halnya dengan kapal induk Tiongkok yang baru berjumlah dua buah tidak bisa begitu saja berlabuh di negara-negara lain,” papar Ikrar.

Satu hal yang jelas, di AS misalnya, setajam apapun perbedaan antara Partai Demokrat dan Republik, sekontroversial apapun Presiden Trump, tujuan geopolitik AS akan tetap sama. Yaitu penguasaan sumber energi dan sumber daya alam lain untuk kepentingan negara dan masyarakat mereka. Demikian pula Tiongkok, geliat ketegangan konflik di Laut Tiongkok Selatan misalnya, tujuan utamanya adalah penguasaan sumber energi dan jalur distribusi energi di sana.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang memiliki berlimpah kekayaan alam dan sumber energi, dan juga merupakan jalur penting distribusi pasokan energi dunia harus waspada. Karena, kekayaan alam dan letak Indonesia yang strategis akan selalu menjadi incaran kekuatan asing. Incaran untuk menguasai Indonesia, atau memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan kekuatan asing itu. Sudah saatnya Indonesia menyadari hal ini. Seperti dikatakan Ikrar, masyarakat

Indonesia harus punya nalar sehat, jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang mudah memecah belah bangsa.

“Ini saatnya kita sadar jangan hanya mendapatkan uang dari asing lantas menjadi budak asing dan menjual negara,” pungkas Ikrar. ●



Time

# Gemuruh Keras

## *Pergeseran Ekonomi Dunia*

**K**etidakpuasan terhadap globalisasi ekonomi terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara maju. Akibatnya, muncul populisme yang kini mulai menggeser tatanan ekonomi dan politik dunia.

Tak bisa dipungkiri, globalisasi ekonomi telah memberi sumbangan besar bagi kemakmuran dunia. Globalisasi merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh dalam membentuk perekonomian dunia dalam 50 tahun terakhir. Dengan globalisasi, negara-negara berkembang dapat mengintegrasikan diri dengan pasar global, memanfaatkan momentum liberalisasi pasar global. Pertumbuhan perdagangan pun melaju lebih cepat dan globalisasi pun sukses menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia.

Cikal bakal bergulirnya globalisasi ekonomi menurut Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia, Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, sebenarnya dimulai pada masa menjelang Perang Dunia II berakhir. Tepatnya, pada tahun 1944 saat dilakukannya Perundingan Bretton Woods di New Hampshire, Inggris, yang dihadiri oleh negara-negara sekutu. Latar belakang diadakannya perjanjian itu adalah adanya pemikiran bahwa kerusakan dan kerugian ekonomi akibat Perang Dunia II tidak bisa hanya dibebankan kepada Jerman sebagai negara yang kalah perang. “Karena, jika hanya dibebankan ke Jerman maka perekonomian Eropa yang kala itu begitu dinamis, akan menghadapi permasalahan keuangan, fiskal, dan moneter yang tidak terbayangkan pada saat itu,” jelas Dorodjatun.

Maka, melalui perundingan itu dibentuklah International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, kemudian

diikuti oleh pembentukan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang kemudian menjadi World Trade Organization (WTO). Salah satu tujuan utama pembentukan badan-badan dunia ini, adalah untuk menghindari perang dagang antar negara pasca Perang Dunia II. Diharapkan, dengan dibentuknya tiga lembaga ini maka persaingan antara kekuatan-kekuatan besar di dunia akan mengikuti protokol tertentu yang disepakati bersama.

Hasilnya, terjadilah keterbukaan ekonomi dunia yang kemudian menjadi globalisasi ekonomi. Laju perdagangan dunia pun berhasil tumbuh lebih cepat dari perkembangan GDP. Ini terutama terjadi karena meningkatnya urbanisasi, dan munculnya golongan menengah di banyak negara, sehingga mendorong tingkat konsumsi masyarakat.

Namun sayangnya, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di dunia ini ternyata tidak bisa menghapuskan kemiskinan dunia. Dominasi korporasi multinasional, pemberian mandat kepada mekanisme pasar sebagai penentu utama ekonomi dunia, ternyata justru menghasilkan ketimpangan ekonomi yang lebar. Dan, dampak buruk itu terjadi tidak hanya di negara berkembang melainkan juga di negara-negara maju.

Simak saja kondisi AS sebagai contoh. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan besar pada pola ekonomi di Amerika Serikat. Banyak pekerjaan yang dulu pantas dikerjakan di negeri Paman Sam itu, mau tidak mau mulai pindah ke negara-negara berkembang, lewat arus modal. Lebih dari 80.000 industri di AS pindah ke luar negeri. Ini menyebabkan persoalan di AS, karena tenaga kerja mereka kehilangan pekerjaan, kota-kota tempat



Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

pabrik-pabrik itu dibangun makin tidak terurus. Tenaga kerja mereka terpaksa bekerja di sektor-sektor di mana keahlian kerja mereka sebenarnya kurang sempurna. Dan, hal yang sama juga terjadi di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis.

“Boleh dikatakan dua pertiga dari penduduk Amerika semenjak globalisasi itu nasibnya tidak pernah berubah dan stagnan,” ujar Dorodjatun.

Begitu besarnya ketimpangan ekonomi, hingga menurut data yang dilansir oleh Oxfam pada tahun 2016 jumlah kekayaan milik delapan orang terkaya dunia –yaitu sebesar 426,2 miliar dolar AS– adalah setara dengan kekayaan 3,6 miliar orang termiskin di dunia.

Ketimpangan ekonomi ini menyebabkan timbulnya frustrasi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini, kemudian menyuburkan tumbuhnya populisme, yaitu semacam gerakan yang berpihak





pada hak-hak dan kepentingan rakyat kecil, dan kecewa pada kebijakan segelintir elit. Di Inggris, populisme ini terlihat dengan munculnya Brexit yang menyetujui agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Sementara di AS, ketidakpuasan masyarakat AS pada elite pemerintahan ujungnya menghasilkan kemenangan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45. Bukan tidak mungkin pemilu di Prancis nanti juga akan mengalir ke arah kemenangan kalangan populisme, sehingga mengarah ke Franxit.

Dampaknya terhadap ekonomi dan politik diperkirakan cukup besar. Betapa tidak. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa, menyisakan PR besar bagi Inggris dan negara Eropa. Aliran perdagangan, pasar, modal, tenaga kerja, antara Inggris dengan lebih dari 20 negara anggota Uni Eropa semua harus ditata ulang.

Sementara di AS, kebijakan Trump yang mengedepankan semboyan “America First” yang tak sepaham lagi dengan globalisasi ekonomi. AS yang sebelumnya merupakan salah satu motor utama liberalisasi ekonomi dunia, kini justru mengambil kebijakan proteksionisme. Trump telah

menyatakan bakal keluar dari beberapa skema perjanjian perdagangan internasional, dan akan mengenakan tarif masuk tinggi untuk barang-barang dari Tiongkok. Langkah itu jelas-jelas akan mempengaruhi dinamika perekonomian banyak negara di dunia.

Lalu bagaimana dampak pergeseran ekonomi dunia itu terhadap Indonesia? Menurut Dorodjatun, Indonesia masih menggantungkan ekonominya pada sektor komoditi, sedangkan sektor manufakturnya masih kecil. Itu sebabnya, posisi Indonesia tergolong lemah. Di pasar komoditas, Indonesia hanya merupakan *price taker* yang tak punya kekuatan untuk menentukan harga komoditas yang ditawarkannya. Padahal, harga komoditas itu mudah sekali guncang sedangkan penentu permainan pasar komoditas berada di negara maju, bukan di Indonesia. Keberuntungan Indonesia saat ini, hanya karena negeri ini memiliki banyak variasi komoditi yang bisa diperdagangkan di dunia. Mulai dari beraneka rempah-rempah, berbagai hasil perkebunan, sampai LNG.

Untuk meminimalisir dampak negatif dari pergeseran ekonomi dunia ke

depan, yang paling mendasar tentu bangsa Indonesia harus memperkuat pondasi perekonomian domestiknya. Indonesia juga harus fokus membenahi industri nasional, terutama manufaktur sehingga mampu mengeksport barang jadi, bukan hanya komoditas. Dengan begitu, ketergantungan pada asing semakin berkurang.

Indonesia juga harus memanfaatkan keberuntungan lainnya, yaitu letak geografi yang sangat strategis. Faktanya, sekitar 40 persen dari pelayaran perdagangan dunia setiap tahunnya harus melewati perairan Indonesia, terutama Selat Malaka, Selat Sunda, juga Selat Lombok dan Selat Makassar. Sebagai contoh, saat ini ada sekitar 5.000 kapal yang melewati Selat Malaka setiap hari.

Ini semua harus disadari. Pemerintah harus menyiapkan diri agar segala potensi dan keberuntungan geopolitik ini bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan mampu bertahan walau diguncang gemuruh keras pergeseran ekonomi dunia. ●

# Pergeseran Kekuatan *Migas Dunia*

*“If you would understand world geopolitics today, follow the oil.”*

Jika ingin memahami geopolitik dunia, ikutilah aliran minyak dan gas. Ungkapan yang dilontarkan oleh Deep Stoa itu tampaknya masih dianggap sangat relevan oleh banyak kalangan, hingga saat ini. Termasuk, Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump. Buktinya, presiden yang penuh kontroversi ini sengaja memilih Rex Tillerson sebagai menteri luar negeri AS. Asal tahu saja, Tillerson adalah bos perusahaan migas ternama AS, ExxonMobil. “Artinya, kebijakan politik luar negeri Trump akan didominasi oleh kepentingan energi,” ujar Deputy Pengendalian Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Parulian Sihotang.

Sampai hari ini, sebagian besar konflik yang melibatkan banyak negara di dunia disinyalir selalu bermuara pada masalah perebutan sumber-sumber minyak dan gas bumi, ataupun lokasi strategis yang menjadi jalur distribusi minyak dan gas bumi. Sebut saja contohnya konflik di Irak, dan Suriah.

Hal ini bisa dimaklumi. Pasalnya, semua negara di dunia ini membutuhkan pasokan energi yang besar untuk memajukan ekonominya, dan mensejahterakan rakyatnya. Dan, sumber-sumber energi migas ini tidak ada di semua negara. Mayoritas sumber energi migas hanya terkonsentrasi di negara-negara Timur Tengah. Sementara, negara yang membutuhkan migas ini banyak sekali, utamanya negara-negara maju seperti Amerika

Serikat (AS), Eropa dan Cina. Nah, inilah yang membuat akhirnya terjadi kompetisi dari negara-negara untuk memperebutkan sumber-sumber migas yang hanya ada di negara-negara tertentu tadi.

Nah, keputusan Trump yang memilih bos ExxonMobil sebagai Menlu akan membuat dinamika geopolitik dunia semakin menantang. Apalagi, peta keseimbangan produksi migas dunia saat ini telah bergeser jauh. Simak saja. Dulu sumber migas hanya ada di negara-negara Timur Tengah. Tapi sekarang, Rusia dan AS juga menjadi pemasok migas utama dunia. Rusia ternyata mempunyai sumber gas yang besar dan membuat negara ini punya *bargaining power* yang tinggi terhadap negara-negara di Eropa. Sekarang, negara-negara Eropa banyak mengimpor gas melalui pipanisasi dari Rusia. Bahkan, Jepang dan Cina juga telah menjadi konsumen energi gas yang terbesar dari Rusia.

Yang lebih menarik, Amerika Serikat kini menjadi penghasil migas yang sangat diperhitungkan di dunia. Ini bisa terjadi karena diadopsinya teknologi *shale oil* di AS. *Shale oil* adalah minyak yang terkandung dalam sejenis bebatuan lunak. Minyak dalam bebatuan ini diekstrak dengan proses pemanasan atau teknik-teknik lain. Dengan ditemukannya cadangan *shale oil* yang melimpah, Amerika Serikat kini memiliki cadangan minyak yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama ratusan tahun ke depan. Malah,



Parulian Sihotang

biaya produksi *shale oil* ini terus menurun seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. *Break-even Point* yang tadinya US\$70 perbarell (1 barell=159 liter) menurun menjadi US\$60, dan cenderung terus menurun.

Revolusi *shale oil* dari AS ini jelas membuat negara-negara penghasil minyak yang tergabung OPEC kerepotan. Pasokan migas AS yang meningkat, mengakibatkan produksi minyak dunia meningkat, sehingga harga minyak mentah dunia terus merosot. Kini, harganya bahkan sampai di bawah biaya produksi. Saudi Arabia yang sebelumnya menikmati kekayaan dari hasil migas, kini mengalami guncangan besar. Ekonomi mereka terganggu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Saudi Arabia berhutang dengan mengeluarkan surat obligasi.

Yang menjadi pertanyaan sekarang



adalah bagaimana Indonesia menyikapi adanya pergeseran geopolitik di sektor energi dunia ini? Menurut Parulian, pergeseran geopolitik ini selain perlu diwaspadai juga memberi peluang bagi Indonesia. Ini, harus segera dimanfaatkan. Revolusi *shale oil* di AS misalnya. Pada satu sisi penurunan harga minyak adalah bagus untuk Indonesia yang banyak mengimpor minyak. Tapi di sisi lain, harga minyak yang murah akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan minyak merugi. Akibatnya, mereka tidak akan mampu melakukan investasi di Indonesia. Kalau tidak melakukan eksplorasi maka cadangan minyak kita yang ada di perut bumi ini tidak bisa kita angkat. Artinya, kita tidak akan mampu menghasilkan produksi migas yang cukup untuk kita konsumsi. Makin lama ini berbahaya, impor makin banyak. “Meski minyak impor murah, tapi kalau banyak kan habis juga devisa kita. Ini punya dampak negatif juga terhadap ketahanan negara kita,” keluh Parulian.

Untuk itu, Indonesia harus segera mencari investor untuk melakukan eksplorasi migasnya. Memang betul investor sedang terpuruk, dan tak mau berinvestasi. Tapi di sisi lain, investasi di sektor migas saat ini juga tengah murah, karena harga yang terpuruk. Harga investasi yang sedang turun harusnya bisa jadi kemudahan tersendiri untuk berinvestasi di bidang eksplorasi migas di Indonesia.

Politik luar negeri AS yang akan fokus ke sektor energi ini adalah salah satu yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Apalagi, ExxonMobil yang dulu dikelola oleh Menlu AS itu punya lahan migas di Indonesia. Itu bisa dijadikan semacam duta untuk menarik investasi dari mereka. “Apalagi Exxon masih punya lahan migas di sini. Kita bisa tarik mereka untuk investasi di sini,” ujar Parulian.

### Laut Cina Selatan

Selain itu, kondisi yang agak krusial dalam pergeseran geopolitik saat ini adalah masalah konflik Laut Cina Selatan. Konflik di wilayah ini pun



getty images

ditengarai berawal dari masalah sumber energy. Wilayah sekitar kepulauan Paracel, Spratly, dan juga perairan Natuna, semuanya memiliki cadangan energi yang besar. Cina, Jepang, Amerika, dan juga beberapa negara ASEAN, memperebutkan wilayah ini. Ini juga salah satu pergeseran geopolitik yang terjadi sekarang. Kalau dulu OPEC *versus* negara-negara konsumen, sekarang Laut Cina Selatan ini menjadi salah satu sumbu konflik. “AS tidak mau melihat Cina menjadi sangat dominan di Laut Cina Selatan. Nah, ini suatu pergeseran geopolitik baru juga,” tambah Parulian.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dengan dinamika geopolitik di Laut China Selatan ini? Terkait dengan masalah migas, Parulian menegaskan bahwa Indonesia harus bergerak cepat untuk melakukan eksplorasi terhadap cadangan-cadangan minyak barunya, terutama yang berada di wilayah-wilayah terluar, yang berdekatan

dengan perbatasan negara lain.

Makanya, Indonesia sekarang harus secepat mungkin mengolah daerah Natuna untuk mendapatkan migas yang ada di sana, sekaligus untuk menunjukkan juga kedaulatan NKRI terhadap daerah ini. “Jika itu tidak dilakukan, bisa mempengaruhi ketahanan energi kita. Karena Cina sekarang terlihat berusaha memperluas areal Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya sampai kepada Natuna,” kata Parulian.

Begitu pula di daerah-daerah perbatasan yang memiliki potensi migas besar, yang dekat dengan perbatasan Australia dan Papua Nugini. Secara teritorial, daerah-daerah terluar yang kaya migas ini harus secepatnya dikelola. “Pertamina harus hadir di sana, atau boleh dengan cara bermitra dengan perusahaan-perusahaan asing. Ini untuk menunjukkan kedaulatan kita,” tambah Parulian lagi. ●



getty images

# *Meremajakan Pancasila Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional*

**K**emampuan bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan nasionalnya saat ini terbilang mengkhawatirkan. Betapa tidak. Hasil pengukuran indeks ketahanan nasional yang dilakukan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI yang dilakukan setiap tahun sejak 2010 sampai 2015 menunjukkan bahwa indeks ketahanan nasional Indonesia tersungkur di skor 2 atau kurang tangguh.

“Sejak tahun 2010 sampai 2015 secara agregat indeks ketahanan nasional Indonesia masih berada di *level* kurang tangguh,” papar Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional (Padnas) Lemhannas RI dalam makalahnya yang berjudul Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Indonesia.

Padahal, ketahanan nasional sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Karena, ia menjamin keberlangsungan hidup dan tercapainya cita-cita perjuangan bangsa.

Nah, hasil indeks ketahanan nasional yang kurang menggembirakan ini menurut Putu Sastra berhubungan erat dengan tingkat keberagaman bangsa Indonesia yang sangat tinggi. Seperti diketahui, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, serta agama yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu menyebabkan Indonesia rentan terhadap terjadinya konflik. Sementara itu, perekat persatuan Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika kian terpinggirkan.

Simak saja. Dalam era reformasi telah bergulir selama lebih dari dua windu, Indonesia telah mengalami berkali-kali konflik sosial di berbagai penjuru Nusantara. Malah, jika tidak ditangani dengan baik, muaranya bisa menuju pada *disintegrasi* nasional. Mulai dari konflik-konflik atau



kasus Mesuji tahun 2011 di Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, kerusuhan sosial yang berakhir dengan pembakaran Kantor Bupati Bima NTB tanggal 27 Januari 2012, kerusuhan sosial antar warga di dua desa bertetangga di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (11/2/2012), serta konflik sosial antar warga di Desa Pelauw, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (10/2/2012).

Masih ada lagi konflik sosial di Cikesik Bekasi, lalu kasus Sidomulyo Lampung, konflik sosial Barisan Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Tengah yang menolak rencana pembentukan Front Pembela Islam (FPI) di provinsi ini, konflik sosial warga Ahmadiyah di Sampang Madura, konflik sosial di Sumbawa Besar Sumbawa NTB (22/01/2013), konflik sosial di Pangukan Sleman DIY bulan Juni 2014 lalu, konflik sosial di Kabupaten Tolikara Papua pada 17 Juli 2015, dan banyak lagi kasus konflik lainnya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, di era globalisasi ini tak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh ideologi asing yang mengalir tak terbandung ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Putu Sastra, masyarakat Indonesia saat ini benar-benar sudah dipengaruhi oleh tiga ideologi besar di dunia. Pertama, Liberalisme yang bersumber dari individualisme, dan menghasilkan kapitalisme. Kedua, Golongan "new left" atau golongan sosial demokrat. Dalam ideologi ini, hak-hak individual yang berlebihan dan melupakan adanya hak-hak sosial. Lalu yang ketiga adalah radikalisme yang seringkali menggunakan mantel agama. "Benar kita memang tidak diduduki lagi oleh penjajah. Tetapi otak kita secara ideologi sudah dikuasai.

Dan, cara berpikir kita sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," tutur Putu Sastra.

Akibatnya, konflik-konflik sosial



Mayjen TNI (Purn)  
Dr. I Putu Sastra Wingarta

kerap terjadi, dan Indonesia mengalami disharmoni sosial yang serius. Ini, memberi pengaruh yang signifikan terhadap melemahnya ketahanan nasional. Hal ini harus segera diperbaiki.

#### **Pentingnya Ketahanan Nasional**

Seperti dijelaskan oleh Putu Sastra, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Segenap aspek kehidupan itu berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Fungsinya, untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan

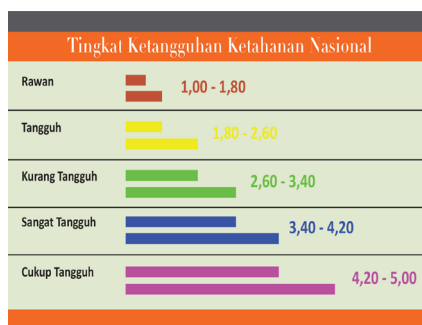
negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Itu artinya, ketahanan nasional adalah suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi, berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia.

Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional adalah gambaran menyeluruh dan terintegrasi dari komponen-komponen sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional. Ketahanan nasional ini meliputi segenap bidang kehidupan yang dipetakan menjadi delapan gatra. Delapan gatra ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu gatra alamiah dan gatra sosial. Gatra alamiah terdiri dari bidang geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Sementara, gatra sosial meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Semua gatra ini harus disinergikan kekuatan dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia.

Sayangnya, indeks ketahanan nasional Indonesia masih berada di level kurang tangguh, akibat merosotnya nilai-nilai kebangsaan.



Menurut Putu Sastra, indeks yang rendah ini seakan menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini kurang memiliki keinginan kuat untuk bersatu. Padahal, seharusnya bangsa ini punya keinginan untuk tetap bersatu, yang tidak didasarkan atas persamaan suku, agama, ras, atau golongan. Melainkan, keinginan bersatu semata-mata karena kebersamaan tujuan, seperti yang telah disepakati dalam tujuan nasional sesuai pembukaan UUD NRI 1945.

Para pendiri bangsa secara jelas telah menyadari, bahwa bangsa Indonesia yang majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, golongan yang melingkupi tanah air dari Sabang sampai Merauke adalah bangsa yang sangat mendambakan persatuan. Bangsa yang kuat keinginannya untuk menjadi satu mencapai satu tujuan sama walau beragam atau Bhinneka. Nilai-nilai luhur yang dikandungnya meliputi nilai toleransi, keadilan, dan gotong royong. “Nah, ketika nilai-nilai itu mengalami kemerosotan dalam kehidupan nasional, ketika itu pula ketahanan nasional Indonesia menjadi merosot. Suatu keadaan yang telah direkam dalam pengukuran Labkurtannas Lemhannas RI sejak tahun 2010,” papar Putu Sastra.

### Meremajakan Pancasila

Untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia, bangsa ini sangat perlu melakukan ‘peremajaan’ pada sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan pada ideologi Pancasila. Sangat

TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
2010	2011	2012	2013	2014	2015
AGREGAT 2,43	AGREGAT 2,44	AGREGAT 2,43	AGREGAT 2,47	AGREGAT 2,56	AGREGAT 2,55
GEOGRAFI 2,62	GEOGRAFI 2,74	GEOGRAFI 2,75	GEOGRAFI 2,74	GEOGRAFI 2,45	GEOGRAFI 2,41
DEMOGRAFI 2,85	DEMOGRAFI 2,83	DEMOGRAFI 2,83	DEMOGRAFI 2,73	DEMOGRAFI 2,87	DEMOGRAFI 2,83
SKA 2,36	SKA 2,35	SKA 2,35	SKA 2,41	SKA 2,56	SKA 2,77
IDEOLOGI 2,47	IDEOLOGI 2,59	IDEOLOGI 2,58	IDEOLOGI 2,56	IDEOLOGI 2,12	IDEOLOGI 2,23
POLITIK 2,88	POLITIK 2,87	POLITIK 2,87	POLITIK 2,84	POLITIK 2,68	POLITIK 2,39
EKONOMI 2,85	EKONOMI 2,86	EKONOMI 2,87	EKONOMI 3,04	EKONOMI 2,98	EKONOMI 2,63
SOSIAL DAN BUDAYA 2,39	SOSIAL DAN BUDAYA 2,47	SOSIAL DAN BUDAYA 2,49	SOSIAL DAN BUDAYA 2,43	SOSIAL DAN BUDAYA 1,92	SOSIAL DAN BUDAYA 2,20
HAN KEAMANAN 2,40	HAN KEAMANAN 2,44	HAN KEAMANAN 2,42	HAN KEAMANAN 2,40	HAN KEAMANAN 2,75	HAN KEAMANAN 2,82

penting melakukan rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika. “Melakukan kebijakan revitalisasi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keadilan, dan gotong royong dalam kehidupan nasional. Nilai-nilai yang memiliki kualitas *prime mover* atau penggerak utama nasionalisme,” papar Putu Sastra.

Perasaan satu komunitas nasional di dalam negeri harus tetap terjaga dengan menggunakan paradigma nasional pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai acuannya. Untuk bisa melakukan itu, penting untuk selalu menanamkan rasa empati sesama anak bangsa untuk menumbuhkan suburkan relasi sosial diantara komponen bangsa. Pancasila yang pada intinya menghendaki gotong royong sangat mendambakan kesuburan empati itu dalam membangun relasi sosialnya.

Meremajakan Pancasila bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, Pancasila menurut Putu Sastra adalah *common denominator*, atau sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, tak peduli ia dari kelompok manapun, suku apapun dan agama apapun.

“Manusia mana yang tidak ingin hak-haknya dijalankan, yang tidak ingin persatuan, keadilan, atau musyawarah mufakat?” tutur Putu Sastra.

Namun, masalahnya adalah mau atau tidak bangsa ini menjalankan Pancasila. Pengaruh tiga ideologi luar tadi, menjadikan bangsa ini melupakan dan meninggalkan Pancasila. Lalu, bagaimana cara termudah untuk meremajakan Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila bisa kembali diterima dan dijalankan oleh bangsa Indonesia, terutama oleh generasi muda? Putu Sastra menjawab singkat: “Keteladanan. Kita harus banyak menciptakan keteladanan.”

Dengan bertambah banyaknya para orang tua, pemimpin, elit politik yang memberi keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka akan semakin banyak pula generasi muda yang mengamalkan Pancasila, mengedepankan toleransi, keadilan, kesamaan tujuan di atas perbedaan. Maka, ke depan kemampuan bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan nasionalnya tak lagi ada di *level* mengkhawatirkan. ●



# *Malapetaka di balik Konflik Dunia*

**D**i balik dinamika geopolitik yang memanas, muncul malapetaka bagi kehidupan sosial budaya di bumi ini. Akibat konflik dan perang, jutaan warga tak berdosa harus mengalami perubahan kehidupan yang drastis. Jika sebelum perang terjadi kondisi kehidupan mereka tentram dengan ekonomi berkecukupan, semasa perang mereka berbalik menjadi pengungsi miskin yang terpaksa pergi bermigrasi ke lokasi lain, bahkan ke negara lain.

Data dari International Organization for Migration (IOM) memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi lonjakan jumlah pengungsi dunia terbesar sejak perang dunia kedua. Sepanjang tahun 2015 ada sekitar 65,3 juta orang di seluruh dunia yang terpaksa berpindah dari tempat asalnya karena konflik, perang dan kekerasan. “Dari jumlah itu, sebanyak 21,3 juta mengungsi melintasi batas wilayah internasional,” demikian bunyi laporan yang dilansir IOM Global Migration Data Analysis Center.

Kondisi ini sangat memprihatinkan. Bencana akibat ulah manusia sendiri seperti perang, konflik tak berkesudahan, nyata-nyata bisa mengubah kondisi penduduk dunia menjadi lebih suram. Lihat saja Suriah. Jika ditinjau dari sisi sejarah, sebelum perang berkecamuk di negaranya, Suriah adalah negara penerima pengungsi terbanyak, terutama pengungsi dari Irak. “Sekarang malah terbalik, Suriah menjadi negara dengan jumlah pengungsi yang terbesar,”

papar Fitriana Nur, National Program Coordinator, Head of Counter Trafficking and Labour Migration Unit, IOM.

Akhir Desember 2015 diperkirakan



Fitriana Nur

ada sekitar 4 juta pengungsi Suriah. Kebanyakan mereka mengungsi lewat jalan darat, berjalan kaki ke negara tetangga terdekat di perbatasan. Yang terbanyak, yaitu sekitar 2,2 juta penduduk Suriah mengungsi ke Turki. Kemudian sekitar 1,2 juta mengungsi ke Lebanon, dan 630 ribu ke Jordania.

Jumlah itu, belum termasuk migrasi karena keterpaksaan atau pengungsian yang terjadi di dalam batas negara itu sendiri. Artinya, karena tempat tinggalnya dilanda bencana perang, penduduk terpaksa berpindah tempat meski masih di dalam negara yang sama. Pengungsi seperti ini disebut sebagai penduduk yang tercerabut dari habitat aslinya (*internally displaced people*). Hingga akhir 2014 ada sekitar

“

Sepanjang tahun 2015 ada sekitar 65,3 juta orang di seluruh dunia yang terpaksa berpindah dari tempat asalnya karena konflik, perang dan kekerasan. Pada tahun 2016 setidaknya ada 7.559 pengungsi meninggal dunia atau hilang.



Republika.co.id

38 juta penduduk tercerabut dari habitat asalnya. Utamanya, karena konflik, perang dan kekerasan di berbagai penjuru dunia, seperti di Irak, Sudan, Congo, Nigeria dan Suriah.

Yang tak kalah mengesankan, dari sekian banyak pengungsi itu tak sedikit yang meninggal dunia ataupun hilang sebelum mereka bisa sampai ke negara tujuan. IOM mencatat di seluruh dunia pada tahun 2016 setidaknya ada 7.559 pengungsi meninggal dunia atau hilang, dan tak pernah bisa kembali ke keluarga mereka. Bahkan, sepanjang 20 tahun terakhir diperkirakan sekitar 60 ribu migran meninggal dunia atau hilang.

Lalu di luar itu semua, besarnya jumlah pengungsi juga membawa permasalahan tersendiri bagi negara-negara penerima. Pasalnya, kebanyakan negara penerima pengungsi adalah negara berkembang dengan perekonomian yang masih belum cukup kuat. Mereka menerima pengungsi biasanya hanya karena alasan kemanusiaan, kesamaan budaya,

dan karena letak geografisnya yang berdekatan. Namun, sebenarnya belum mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup untuk menangani begitu banyak pengungsi dari negara lain.

Lebanon contohnya. Negara berpenduduk sekitar 5 juta jiwa ini harus menerima dan menangani 1,2 juta pengungsi dari Suriah. Itu berarti sekitar seperlima dari penghuni negara mereka adalah pengungsi. Untuk menangani pengungsi, negara penerima bisa dibilang sangat menggantungkan diri bantuan dana dari lembaga internasional. Dan, besarnya dana bantuan biasanya hanya sekitar 50 persen dari kebutuhan para pengungsi. Maka, tak heran jika kondisi para pengungsi di negara pengungsian pun mengesankan. "Akibatnya, para pengungsi harus mencari cara-cara lain untuk bisa *survive*," jelas Fitriana.

Jadilah mereka terpaksa bekerja di bawah upah standar. Pria bekerja di sektor bangunan dengan upah yang jauh lebih murah dibanding pekerja

asal Lebanon. Anak-anak di bawah umur terpaksa dikirim untuk bekerja di ladang dengan upah hanya 1 dolar AS. Bahkan, beberapa wanita pengungsi asal Suriah mulai bekerja menjadi pembantu rumah tangga dengan upah yang jauh di bawah standar. Ini, kemudian pada gilirannya menimbulkan ketegangan antara penduduk migran dan penduduk asli yang juga kini menjadi tersaingi dalam mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Muncul sentimen negatif terhadap para pekerja migran, yang diistilahkan sebagai *Xenophobia*. Yaitu, ketakutan atau ketidaksukaan yang irasional terhadap orang asing. Akibatnya, para migran ini semakin mendapat perlakuan yang tidak adil.

Lepas dari segala persoalan yang ada terkait migrasi lintas batas negara ini, Fitriana menjelaskan bahwa sebenarnya migrasi adalah hal yang tidak bisa dihindarkan, dan tak bisa dilarang. Yang dapat dilakukan, adalah menyelenggarakan *border management*





Geotime.co.id

atau manajemen perbatasan yang baik. Jika ditangani dengan baik, maka masuknya seseorang ke negara tertentu bisa membawa manfaat. Tapi sebaliknya, jika tidak ditangani dengan baik maka akan membawa dampak yang buruk.

Presiden baru Amerika Serikat (AS) Donald Trump misalnya, secara kontroversial berupaya melarang masuk migran dari 7 negara Islam di Timur Tengah ke AS. Alasannya, untuk mencegah masuknya teroris ke AS. Ini artinya Donald Trump jelas-jelas melakukan generalisasi bahwa setiap migran dari 7 negara Islam itu adalah teroris. Bahkan istilah teroris atau radikal, kini diubah oleh Trump dengan istilah baru yaitu *Islamic terrorist*. Tak hanya itu, ia juga mencoba membangun dinding tinggi sepanjang perbatasan

AS dan Meksiko, untuk menahan laju migrasi Meksiko ke AS.

Nah, ketika kebijakan AS dalam isu migran ini sangat buruk, dan Uni Eropa pun tak sepenuhnya mau menampung pengungsi, Indonesia sebagai negara yang penuh keragaman seharusnya bisa menjadi *role model* bagi dunia terkait isu migran ini. “(Harus diupayakan) bagaimana kita bisa menjadi *leader* di dalam isu migran. Tunjukkan bahwa kita masih bisa hidup berdampingan dengan migran di Indonesia yang kondisinya relatif aman,” pungkas Fitriana.

Langkahnya adalah dengan melakukan manajemen perbatasan yang baik. Jadi, setiap orang yang keluar masuk perbatasan suatu negara memiliki motif yang berbeda-beda. Ada

yang murni mencari perlindungan, mencari peningkatan ekonomi, dan ada pula yang bermotif kriminal. Negara memang tidak bisa mengetahuinya secara pasti, tapi negara juga tidak boleh melakukan generalisasi. Misalnya, menggeneralisasi bahwa setiap orang yang datang dari negara-negara Timur Tengah pasti adalah kaum radikal atau teroris yang tidak boleh diberikan akses masuk. Indonesia tak boleh melakukan itu. Tunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi panutan. Bahwa, meskipun geopolitik memanas, negeri ini tetap jadi yang terdepan dalam hal menghargai perbedaan, termasuk menerima dan menangani migran dengan baik. ●

# Melawan Perdagangan Manusia

Kondisi kehidupan para pengungsi yang sulit di negara penerima, ternyata dipandang sebagai peluang bisnis yang menggiurkan oleh sebagian kalangan yang tidak bertanggung jawab. Kesulitan ekonomi yang membelit para pengungsi ini dimanfaatkan oleh para komplotan pelaku perdagangan manusia atau *human trafficking*. Mereka memperdagangkan para pengungsi, memanfaatkan tenaga mereka, sehingga para migran ini dieksploitasi, disuruh bekerja dengan jam kerja yang berlebihan, upah sangat minim dan sebagainya. Lalu, khusus untuk pengungsi wanita diperdagangkan di industri seks dengan modus perkawinan. Dengan alasan frustrasi, para orang tua mereka di pengungsian seringkali terpaksa merelakan anak perempuan mereka menjadi korban.

Korban perdagangan manusia juga sangat tinggi. Pada 2015, IOM telah berhasil membantu membebaskan sekitar 7.000 korban *trafficking* di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 7 persen diantaranya adalah korban yang diperjualbelikan untuk keperluan seksual.

Fitriana menambahkan, jumlah itu bisa jadi belum merepresentasikan angka yang sebenarnya. Sebab menurut dia, melakukan pendataan korban *trafficking* ini sangat sulit. Sebelum dapat tertolong, si korban harus bersusah payah terlebih dulu untuk bisa keluar dari tempat ia dieksploitasi. Artinya, masih banyak korban-korban yang belum bisa keluar dari situasi eksploitasi yang dialaminya. Namun, IOM memperkirakan setidaknya 20,9 juta orang di dunia hidup sebagai korban *human*



*trafficking*.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pun rentan untuk menjadi korban *human trafficking*. Bahkan karena tingginya kejadian kasus eksploitasi TKI, pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke luar negeri. Menurut Fitriana Nur, kebijakan ini sebenarnya niatnya baik, tapi manfaatnya tidak begitu dirasakan. “Istilahnya *hitting the target, missing the point*,” ujar Fitriana.

Ia berkesimpulan seperti itu karena dua hal. Yang pertama, karena mobilitas manusia tidak bisa dibatasi. Pemerintah pun tak akan bisa mengawasi sepenuhnya. Terlebih di Indonesia, begitu banyak pintu keluar-masuk negara, baik yang legal mau pun illegal. Bahkan para pencari kerja di luar negeri





Pixabay

ini bisa mengubah rute keberangkatan melalui negara lain. Selain itu, Indonesia boleh saja memberlakukan moratorium pengiriman TKI. Tapi, di sisi lain negara penerima TKI tidak memberlakukan moratorium penerimaan tenaga kerja, karena menurut mereka itu melanggar konstitusi. Setiap masyarakat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh tenaga kerja.

Yang kedua kata Fitriana, menghentikan pengiriman TKI sama saja dengan melihat penyebab permasalahan yang dialami para TKI di sisi mobilisasi. Padahal permasalahannya ada pada sisi kondisi pekerjaan dan perlindungan para TKI

di negara penerima. Nah, itulah yang harusnya diperbaiki oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI di negara penerima, pemerintah Indonesia bisa memperbanyak jejaring dengan pihak manapun yang terkait. Pemerintah bisa berjejaring dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di negara yang bersangkutan, dengan *pressure group* di sana, selain berjejaring dengan pemerintah setempat. Menurut Fitriana, LSM di negara penerima cukup mempunyai suara, mereka mampu memasukkan isu migran yang positif, bahwa pekerja domestik adalah pekerja, dan mereka bukan barang peliharaan yang boleh diperlakukan semena-mena.

Jadi, masalah perlindungan TKI yang harus diperbaiki. Jaringan aparat pemerintah pun harus peka mengenai hal ini. Mereka harus tahu apa saja hal-hal yang merupakan indikasi dari terjadinya perdagangan manusia. Misalnya, ketika berinteraksi dengan TKI, mereka harus bisa mengetahui apakah para TKI ini tengah menjadi korban perdagangan manusia atau tidak. Eksploitasi tenaga kerja, jam kerja yang berlebihan, gaji yang sangat jauh di bawah standar, tak bisa komunikasi dengan keluarga, itu adalah indikasi perdagangan manusia. Pelanggaran seperti itu tidak boleh hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif semata.

Fitriana menambahkan, para TKI harus diperkuat, dilatih, dan tidak dipandang hanya sebagai komoditas. Jadi, apapun upaya untuk mengelola pengiriman TKI harus melibatkan si calon TKI itu sendiri. Harus dikondisikan agar TKI mampu mengurus dokumennya sendiri, memahami peraturan yang berlaku, serta mendekatkannya dengan akses informasi yang penting. Dengan begitu, para migran asal Indonesia ini akan punya kemampuan untuk bertahan hidup di negeri orang.

Jangan memposisikan TKI sebagai orang yang bodoh. Harus ada sistem seleksi yang tepat bagi calon TKI. Jika calon TKI tidak mampu mengurus dokumennya sendiri, atau tidak memahami peraturan yang berlaku, maka mereka tidak bisa lolos seleksi untuk pergi bekerja di luar negeri. "Seleksi sangat dibutuhkan agar TKI memenuhi kualifikasi. Kualifikasi itu sendiri harus mulai ditentukan," jelas Fitriana.

Kalau ini sudah dilakukan, para TKI pun tidak lagi rentan untuk menjadi korban eksploitasi perdagangan manusia. ●

# *Cegah Diabetes Cara Alami*

Setiap tahun, kian banyak manusia yang mengidap diabetes. Menurut data International Diabetes Federation, pada tahun 2015 ada sekitar 415 juta orang dewasa yang mengidap diabetes, dan 318 juta lainnya mengidap gangguan toleransi diabetes. Parahnya lagi, merujuk data dari WHO, Indonesia menduduki peringkat tujuh di dunia dalam jumlah pasien penderita diabetes terbanyak di dunia. Jumlahnya, sekitar 10 juta penderita diabetes di Indonesia. Sayangnya, kebanyakan dari pengidap diabetes tidak sadar sudah terjangkit penyakit yang seringkali disebut kencing manis ini.



getty images



Lalu, apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis (menahun) yang terjadi ketika pankreas (kelenjar ludah perut) tidak memproduksi cukup insulin untuk tubuh. Atau, ketika tubuh tidak secara efektif menggunakan insulin. Diabetes ini biasa ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah diabetes yang disebabkan tubuh tidak efektif menggunakan insulin atau kekurangan insulin yang relatif dibandingkan kadar gula darah.

Singkatnya begini. Sel-sel dalam tubuh manusia membutuhkan energi dari zat gula (glukosa) dari makanan yang kita makan, untuk bisa berfungsi dengan normal. Yang biasanya mengendalikan gula dalam darah, adalah hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Insulin membantu sel mengambil dan menggunakan glukosa dari aliran darah. Jika tubuh kekurangan insulin, maka sel tidak dapat menyerap zat gula dalam darah. Akibatnya, gula tetap berada di dalam sel darah, sehingga kadar gula darah meningkat. Apalagi, ketika sel tak bisa menyerap gula tapi asupan gula dari makanan terus berlebih. Jika itu terjadi, kadar gula darah akan meningkat drastis. Inilah yang memicu dan menjadi penyebab penyakit diabetes (diabetes melitus).

Ada beberapa faktor yang dapat mempertinggi resiko seseorang terkena diabetes. Faktor resiko pertama adalah, usia. Resiko diabetes akan meningkat seiring bertambahnya usia. Faktor kedua, keturunan. Jika seseorang memiliki orang tua, kakak, atau adik penderita diabetes maka hal itu akan meningkatkan resiko terkena diabetes. Faktor etnis juga menambah resiko, orang etnis Asia beresiko lebih tinggi terserang diabetes. Faktor berat badan juga menambah resiko diabetes. Penderita obesitas memiliki resiko diabetes lebih tinggi. Yang beresiko lebih tinggi, adalah wanita dengan ukuran pinggang 80 cm atau lebih, serta pria Asia dengan ukuran pinggang 90 cm atau lebih.

Karena itu, jika Anda memiliki resiko tinggi untuk terserang penyakit diabetes maka ada baiknya untuk melakukan pencegahan secara dini. Antara lain

dengan menjaga berat badan ideal, selalu melakukan aktivitas fisik, serta menjaga asupan makanan sehat dan seimbang. Seperti mengurangi asupan karbohidrat, dan zat gula. Selain itu, mengonsumsi buah-buahan tertentu pun dapat membantu mengurangi dan mengatur kadar gula di dalam darah. Berikut ini beberapa buah-buahan yang mampu mencegah risiko terkena diabetes.

#### Apel

Apel diketahui memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga cocok untuk mengatur kadar gula di dalam darah. Selain itu, Apel memiliki kandungan karbohidrat, serat, vitamin C dan mineral yang baik bagi tubuh.

#### Anggur

Buah anggur mampu mencegah kadar glukosa darah meningkat drastis. Itulah mengapa dokter merekomendasikan anggur bagi penderita diabetes. Anggur kaya vitamin C dan K, potasium, dan *polyphenols*. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa dengan mengonsumsi 10 buah anggur per hari mampu mengurangi risiko terkena diabetes.

#### Aprikot

Mengonsumsi satu buah aprikot sama

halnya dengan mengonsumsi 17 kalori dan 4 gram karbohidrat. Sehingga buah ini sangat cocok untuk mencegah risiko terkena diabetes.

#### Blueberry dan Strawberry

Blueberry dan Strawberry mengandung antioksidan, vitamin, dan serat yang tinggi, ditambah indeks glikemik yang rendah sehingga ideal bagi pencegahan penyakit diabetes dan diet bagi penderita diabetes.

#### Ceri

Tak hanya mampu mencegah diabetes, kandungan antioksidan tinggi yang terdapat dalam buah Ceri mampu membantu melawan kanker.

#### Kiwi

Kiwi merupakan buah yang tinggi serat, serta fruktosa yang mampu menekan kadar gula darah. Kandungan Inositol yang terdapat pada buah Kiwi mampu mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes.

#### Pir

Buah dengan kadar vitamin K yang tinggi ini mampu menjadi sumber serat alami bagi tubuh. Menambah buah pir ke dalam rencana diet rendah gula Anda dapat mencegah risiko terkena diabetes. ●



getty images

*Dr. Ir. Nur Masripatin MFor.Sc.*

## *NDC Indonesia: The Grand Design of Environmental Resilience of Indonesia*



**P**RESIDEN RI pada pidatonya di Pertemuan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan pada awal Persidangan Konvensi Perubahan Iklim (15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change/COP-15 UNFCCC) di Paris Desember 2015, menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi dalam upaya global mencegah dampak negatif perubahan iklim.

Sebagai wujud dari pernyataan komitmen tersebut, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) dengan UU No. 16 Tahun 2016 dan NDC (Nationally Determined Contribution) adalah amanat Paris Agreement untuk setiap negara yang meratifikasinya. NDC sesuai desainnya berisi komitmen untuk berkontribusi pada upaya global mencegah dampak negatif perubahan iklim yang dikenal dengan mencegah kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2°C dibanding era pra-industrialisasi dengan tetap dapat melanjutkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan periode komitmen awal adalah 2020-2030. Paris Agreement

juga mengamanatkan setiap negara untuk memiliki Strategi Pembangunan Jangka Panjang yang rendah emisi gas rumah kaca (GRK) dan berketahanan iklim (*long-term low carbon and climate resilience development strategy*), yang pada dasarnya adalah transformasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang selama ini kita pahami. NDC adalah path menuju pembangunan jangka panjang rendah emisi dan berketahanan iklim.

Melalui NDC, Indonesia menyatakan komitmen penurunan emisi GRK sebesar 29% - 41% dari Business As Usual (BAU) 2030 sebesar 2,869 Giga Ton CO<sub>2</sub>e, yang diproyeksikan dari emisi GRK tahun 2010 sebesar 1,334 Giga Ton CO<sub>2</sub>e. Komitmen penurunan emisi GRK 29% dilakukan melalui lima kategori sektor yaitu: (1). Hutan dan lahan (17,20%), (2) Energi (11%), (3) Limbah (0,38%), (4) *Industrial process and product use/IPPU* (0,10%), dan (5) Pertanian (0,32%).

Persentase tersebut akan bicara lain bila dibandingkan dengan BAU masing-masing sektor. Sektor hutan dan lahan yang menempati urutan tertinggi yang harus menurunkan emisi 17,2% emisi nasional harus menurunkan sebesar hampir 70% dari BAU sektor tersebut pada tahun 2030; sedangkan sektor energi dengan 11% target pengurangan emisi nasional, tidak lebih dari 20% dari emisi BAU sektor tersebut. Sektor limbah dari aspek kontribusi penurunan emisi hanya kecil dibanding sektor hutan dan energi (3,7% dari BAU sektor yang bersangkutan), namun karena dampak lain dari aspek lingkungan, estetika, kesehatan dan lain-lain maka sektor ini tetap perlu penanganan yang serius, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat luas. Sektor limbah, industri dan pertanian masih banyak memerlukan pembangunan *ownership* dan komitmen di berbagai pihak baik di pusat maupun daerah, baik pemerintah maupun swasta/masyarakat tentang peran sektor ini dalam pencapaian NDC yang seharusnya tidak dipisahkan dari upaya membangun.



Untuk dapat mencapai target pengurangan emisi yang telah dinyatakan dalam NDC, komitmen tersebut harus terintegrasikan ke perencanaan Kementerian/Lembaga/Pemda dan membagi tanggung-jawab ke seluruh aktor pembangunan. Komitmen sektor harus diletakkan dalam keseluruhan konteks pembangunan nasional di dalam menentukan intervensi kebijakan dan aksi yang harus dilakukan melalui sektor-sektor.

Sebagai negara kepulauan dengan pantai rendah (*low laying coastal areas*) yang sangat panjang, dan hampir 60% penduduknya tinggal di daerah pantai, penting bagi Indonesia untuk menempatkan upaya peningkatan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim bersama dengan upaya pengurangan emisi GRK. Pada dasarnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti dua sisi mata uang, keberhasilan mitigasi akan mengurangi kerentanan atau meningkatkan resiliensi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Kegagalan mitigasi akan menyebabkan biaya yang sangat tinggi untuk adaptasi di kemudian hari atau penanggulangan *loss and damage* akibat perubahan iklim.

Tantangannya adalah dalam menyatukan derap-

langkah pembangunan dan komitmen global yang suka/tidak suka mempengaruhi tatanan nasional; belum tertanamnya paradigma bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan komitmen dibawah NDC adalah hal yang harus ditangani secara terintegrasi. Masih banyak pihak yang melihat Paris Agreement sebagai sesuatu yang merugikan, penambahan beban dan menghambat pembangunan, sementara masyarakat global sudah menangkap berbagai peluang yang terbuka dan dapat dibuat dengan adanya *regime* perubahan iklim.

Meskipun kesulitan yang dialami dalam pergaulan global sudah nyata terkait dengan isu lingkungan, dan dampaknya sudah dirasakan oleh berbagai wilayah di Indonesia, masih banyak pihak yang menempatkan pembangunan dan mitigasi/adaptasi perubahan iklim atau mencegah kerusakan lingkungan sebagai *trade off* terhadap pembangunan, bukan sesuatu yang harus didesain untuk menuju harmoni dalam jangka panjangnya.

Indonesia pernah dinobatkan menjadi emiter GRK terbesar ketiga di dunia karena emisi dari kebakaran lahan gambut, meskipun angka tersebut hasil





ekstrapolasi yang secara *scientific* tidak bisa diterima pada waktu itu. Baru-baru ini kita dinobatkan menjadi penyampah plastik di laut terbesar kedua di dunia, lagi-lagi dengan data dan metode yang secara *scientific* juga masih diragukan. Belum lagi kejadian kebakaran hutan dan lahan, pada tahun 2015 hampir di seluruh dunia, negara yang memiliki hutan mengalami kebakaran hutannya, namun liputan global tidak sedahsyat Liputan Karhutla Indonesia, karena : (1) kebakaran hutan dan lahan yang telah menimbulkan kerugian sebesar RP 221 triliun bagi

Akhirnya, aksi nyata disertai data dan basis ilmiah yang kuat, transparansi serta perangkat teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang memadai dengan pengguna yang bertanggung jawab akan membantu Indonesia dalam percaturan global.

Perbaikan tata-kelola kehutanan yang terjadi beberapa tahun terakhir baik dari sisi reformasi kebijakan termasuk komitmen *One Map Policy*, penguatan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan lahan dan ekosistem gambut, pencegahan



Indonesia tersebut, juga menimbulkan emisi GRK (yang menjadi urusan global) yang besar, (2) polusi udara yang berdampak ke kesehatan, terganggunya kegiatan ekonomi Indonesia sampai ke negara tetangga (urusan lokal, nasional dan regional), dan (3) juga merupakan bagian dari percaturan persaingan regional dan global.

Dari ketiga kejadian besar ini, diperlukan komitmen semua pihak untuk menjaga kepentingan bangsa dan ketahanan negara, dan tidak memberi ruang masyarakat internasional memojokkan kita sebagai perusak lingkungan yang merugikan masyarakat global, karena pihak yang paling terugikan akibat kerusakan lingkungan adalah Indonesia sendiri terutama masyarakat yang berada di wilayah yang secara geografis rentan maupun karena kemiskinan serta literasi dan keterampilan yang rendah.

kebakaran hutan dan lahan yang semuanya didukung dengan komitmen dari pimpinan tertinggi sampai tingkat tapak, teknologi dan sistem *monitoring* yang semakin baik dan transparansi yang menjadi prinsip utama telah mengundang apresiasi dunia atas upaya yang dilakukan Indonesia.

Namun masih banyak hal yang menuntut komitmen tingkat tinggi; NDC yang tak lain adalah desain komitmen global yang didasarkan pada kekuatan dan kepentingan nasional, melalui sektor hutan dan lahan, energi, industri, limbah dan pertanian, tidak bisa dibebankan kepada Pemerintah saja tetapi juga memerlukan komitmen Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, lembaga keuangan dan berbagai pihak lainnya, sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan COP-UNFCCC di Paris yang mengadopsi Paris Agreement. ●



Muhammad Iqbal, Ph.D.  
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana  
Jakarta dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI

# *Hal-hal Baru dari Pendidikan Lemhannas RI*



Pendidikan di Lemhannas RI ternyata banyak membawa manfaat. Hal ini diakui oleh Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta, Muhammad Iqbal, Ph.D. Yang sempat menjadi peserta pendidikan di Lemhannas. “Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, khususnya berkaitan dengan wawasan kebangsaan, sikap dan kepribadian, serta pengetahuan mengenai peta politik dunia yang mampu meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap bangsa dan negara,” Jelas Iqbal.

Ia menambahkan, pendidikan Lemhannas juga membuat dirinya terbuka dalam hal pengetahuan kebangsaan, membuatnya memiliki jaringan yang luas, dan akhirnya menambah kepercayaan dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya.

Iqbal yang juga bertugas sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR-RI berpendapat, materi dari pendidikan Lemhannas yang paling bermanfaat

baginya adalah tentang Wawasan Nusantara. Karena, dengan Wawasan Nusantara yang luas dan mendalam, akan memunculkan sikap cinta tanah air, bijak dalam mengambil keputusan, mampu memahami perbedaan di antara sesama bangsa, dan memiliki sikap bela negara yang tinggi.

“Ilmu ini sangat bermanfaat ketika saya sebagai tenaga ahli wakil ketua MPR dalam memberi masukan berkaitan dengan isu-isu nasionalisme, demikian juga ketika sebagai dekan dan dosen saya memberikan pembelajaran kepada mahasiswa terutama untuk menumbuhkan nasionalisme di kalangan mahasiswa,” tutur Iqbal.

Sebagai masukan, pria yang menyelesaikan studi S3 Industrial and Organizational Psychology di Universiti Kebangsaan Malaysia ini, menyarankan agar apa yang disampaikan para pengajar di Lemhannas dibuatkan modul standar. Dengan demikian, dalam pengajaran antara pengajar yang satu dengan yang lain memiliki kualitas dan standar yang sama. Ia juga mengusulkan bahwa para pengajar perlu di sertifikasi, sehingga akan ada keseimbangan antara praktisi dan akademisi. Tujuannya, agar Lemhannas semakin mampu menghasilkan pendidikan yang berkualitas. ●



MAHERSHALA ALI AKTOR HOLLYWOOD ◦

## *Artis Hollywood Ramai-ramai Kecam Trump*

getty images

**T**erpilihnya Donald Trump sebagai Presiden di Amerika Serikat menimbulkan banyak polemik. Di bulan pertama pemerintahannya saja, Trump membuat sebuah kebijakan melarang masuknya imigran dari tujuh negara muslim di dunia, serta merencanakan pembangunan tembok besar sepanjang perbatasan AS dan Meksiko.

Kebijakan Trump yang dinilai kontroversial ini membuat banyak warga Amerika Serikat geram, termasuk para selebritis. Pada acara Academy Awards atau Oscar yang digelar untuk ke-89 kalinya, 26 Februari 2017 lalu di Dolby Theatre, Los Angeles misalnya, banyak selebritis yang mengenakan pita biru sebagai bentuk dukungan terhadap American Civil Liberties Union (ACLU), sebuah organisasi yang membela hak imigran di AS.

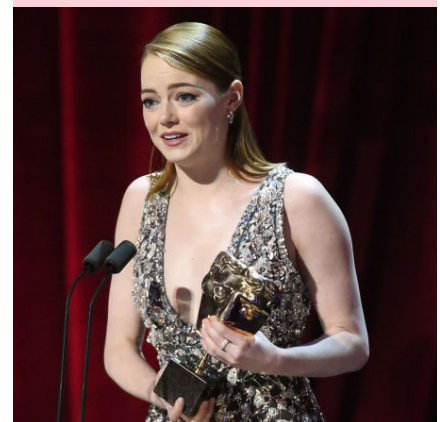
Aktris Ruth Negga nominator Oscar dari film *Loving*, Barry Jenkins, sineas film *Moonlight* yang memenangkan Best Picture, hingga supermodel Karlie Kloss menjadi perhatian karena memasang pita biru tersebut. Uniknya, Kloss adalah super model yang kini tengah berkencan dengan Joshua Kushner, saudara dari suami Ivanka Trump.

Ada pula sutradara asal Iran, Asghar Farhadi tak bersedia datang ke Oscar sebagai protes terhadap Trump.

Padahal, Farhadi berhasil menyabet penghargaan film berbahasa asing terbaik melalui film *The Salesman*. Protesnya ini sebagai bentuk dukungan terhadap negara yang dilarang masuk ke Amerika, termasuk negaranya.

Mahershala Ali, mualaf yang berhasil memenangkan Aktor Pendukung dengan Performa Terbaik di Screen Actors Guild dan Oscar lewat film *Moonlight* ini, juga mengkritik Trump saat menerima penghargaan di panggung. Ia mengatakan bahwa dalam melihat perbedaan, ada dua sudut pandang yang bisa digunakan. "Ada kesempatan untuk mengenal siapa orang itu, karakteristik yang membuatnya unik. Atau ada juga kesempatan untuk memukul genderang perang, katakan saja karena aku dan kamu berbeda," ujar Mahersala.

Musisi Katy Perry pun ikut menyuarakan kritiknya di ajang Grammy Awards 12 Februari 2017 lalu. Ia mengenakan sebuah aksesoris bertuliskan kata "Persist" atau bertahan, dan meneriakkan seruan "No Hate!" di sela penampilannya di ajang itu. Aktris Emma Stone yang bersinar karena perannya di film *La La Land*, tak mau ketinggalan. "Negara ini (Amerika) dan dunia tampaknya sedang mengalami masa sulit yang membuatnya sangat terpecah," tutur Emma, saat menerima BAFTA Awards.



Aktris Ellen DeGeneres yang mengisi suara Dory di film animasi *Finding Dory* tak kalah keras mengecam Trump. Seperti diketahui Donald Trump memilih film *Finding Dory* pada acara nonton bareng di Gedung Putih. Ellen langsung mengkritik bahwa kebijakan Trump sangat bertentangan dengan inti cerita *Finding Dory*. Dory, kata Ellen, berhasil sampai di Amerika, namun dia terpisah dari keluarganya. Beruntung hewan lainnya menolong Dory, padahal mereka adalah jenis hewan yang berbeda dan tak punya keuntungan dengan menolong Dory. "Mereka menolong Dory meski berbeda warna. Itu yang harus kalian lakukan saat melihat orang menghadapi kesulitan. Kau menolongnya tanpa melihat latar belakang, apalagi ras," tegas Ellen DeGeneres. ●



# Wisata Bali Yang Mempesona Raja Salman



**D**alam kunjungannya ke Indonesia awal Maret 2017 lalu, Raja Salman beserta rombongan dari Arab Saudi tidak hanya datang untuk keperluan kenegaraan saja. Setelah menghabiskan awal kunjungannya dengan agenda kenegaraan di Jakarta, Raja Salman bersama 1.500 rombongannya berlibur ke Bali.

Liburan yang semula dijadwalkan dari tanggal 4 - 9 Maret itu, nyatanya diperpanjang hingga tanggal 12 Maret. Tampaknya Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud beserta rombongan keluarga Kerajaan Arab Saudi ini merasa betah berada di Bali. Seperti yang dikutip dari laman Kompas.com, Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengki Widjaja, mengatakan "Menurut Duta Besar Arab Raja Salman betah di Bali karena cuacanya cenderung stabil."

Hal ini juga terlihat pada akun media sosial Instagram milik Pangeran Fahad bin Faisal Al Saud @yolofahad, yang juga merasa terkesan dengan liburannya di Bali. Ia mengunggah gambar bendera merah putih dan kalimat bertuliskan "Terima Kasih Indonesia" yang langsung diserbu ribuan komentar netizen.

Apa yang membuat Raja Salman dan keluarga Kerajaan Arab Saudi betah di Bali? Berikut ini kami sajikan beberapa pesona wisata Bali, serta fasilitas-fasilitas mewah yang dinikmati Raja Salman dan

rombongannya di Pulau Dewata itu.

## **The St. Regis Bali Resort**

Hotel bintang lima di kawasan resort Nusa Dua ini dipilih sebagai tempat beristirahat untuk Raja Salman dan keluarga Kerajaan Arab Saudi. Dengan tarif kamar paling mahal sebesar Rp 73



getty images

juta per malam, diperkirakan selama sembilan hari berlibur di Bali, Raja Salman menghabiskan Rp 10 miliar untuk biaya menginap di sana. Asal tahu saja, hotel ini telah masuk dalam daftar bergengsi Condé Nast Traveler Gold List 2016 sebagai salah satu Resor Favorit di Dunia dan Resor Terbaik di dunia.

## **Pantai Geger**

Keindahan pasir putih Pantai Geger menjadi salah satu spot yang menarik perhatian Raja Salman dan rombongan.

Pantai yang berlokasi

tidak jauh dari St. Regis Bali Resort ini memang dipilih untuk bersantai oleh Raja Salman.

## **Hilton Bali Resort**

Dengan tarif berkisar antara 6 juta rupiah permalam, rombongan kerajaan Arab Saudi menginap di Hotel dengan kolam renang bak oase di tengah padang pasir ini. Dengan kamar yang langsung menghadap ke pantai yang menjadi pemandangan istimewa untuk pangeran dan rombongan tamu dari Arab Saudi.

## **Ubud**

Panorama sawah di Ubud ternyata menjadi daya tarik bagi rombongan Raja Salman. Kawasan Ubud sendiri terkenal dengan pemandangan persawahan terasiring yang berbukit dan menjadi lokasi syuting film Hollywood, 'Eat Pray Love' yang dibintangi Julia Roberts.

## **Masjid Agung Ibnu Batutah**

Masjid Agung Ibnu Batutah yang berdiri berdampingan dengan sebuah pura dan gereja yang menjadi simbol toleransi beragama dan kebersamaan masyarakat Bali. Masjid ini dipilih oleh rombongan Raja Salman untuk menunaikan shalat Jumat. Masjid yang selalu dipadati jamaah ini masuk ke dalam daftar 100 Masjid Terindah di Indonesia. ●

# *Kapal Pesiar Inggris Tabrak Karang Raja Ampat*

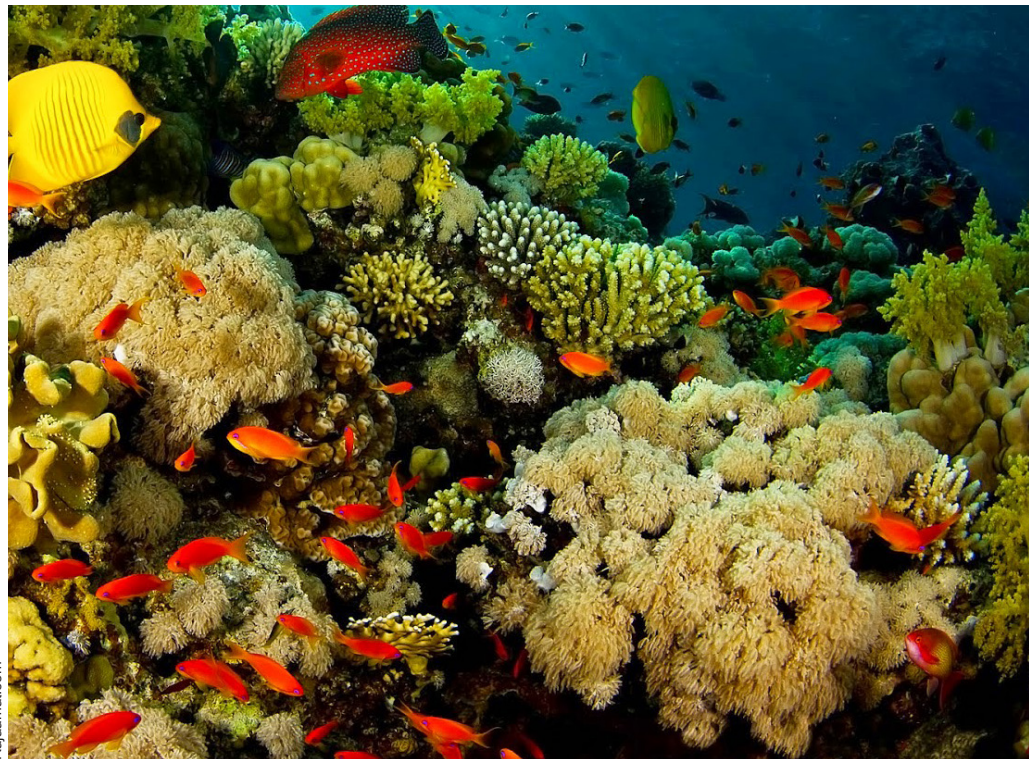
**P**ada 4 Maret 2017, Indonesia dilanda musibah. Sekitar 13.532 meter persegi area terumbu di Raja Ampat yang begitu indah, rusak akibat tertabrak kapal pesiar Inggris, Caledonian Sky milik perusahaan Noble Caledonia. Kapal berbobot 4.200 ton itu melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kejadian ini diperkirakan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 248 triliun.

Awalnya, Kapal yang mengangkut sekitar 100 orang turis itu hendak melanjutkan perjalanannya menuju Bitung. Namun, kapal yang dinahkodai Kapten Keith Michael Taylor tersebut kandas di atas sekumpulan terumbu karang yang tak ternilai di Raja Ampat.

Dengan hanya merujuk pada petunjuk GPS dan radar tanpa mempertimbangkan faktor gelombang dan kondisi alam sekitar, kapal pesiar itu berhasil kembali berlayar. Namun imbasnya, terumbu karang Raja Ampat rusak parah.

Dikutip dari CNN Indonesia, Aktivis Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution mempertanyakan perizinan kapal Caledonian Sky berlayar ke Raja Ampat. “Ukurannya besar, harusnya dia berhenti di pelabuhan kemudian awak kapal beserta rombongan dipindahkan ke kapal pengangkut kecil untuk kemudian menikmati keindahan alam di sana, bukan maju terus seperti itu,” tegas Arifsyah.

Menanggapi kejadian tersebut, PelaksanatugasSekretarisKementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Jamalludin mengatakan, pada prakteknya Kapal MV



Rajaamat.com

Caledonia Sky berlayar di zona yang membolehkan kapal pesiar berlayar. Namun, dia mengakui dalam kebijakan itu tidak disebutkan klasifikasi bobot kapal yang boleh berlayar di kawasan tersebut. “Kami akan melihat pembelajaran dari The Great Barrier Reef di Australia. Di situ disebut kapal yang boleh masuk ukurannya sekian. Hal seperti itu akan kita perbaiki,” kata Ridwan.

Pihak Noble Caledonia sendiri sudah menyatakan kesanggupan untuk membayar ganti rugi yang disebabkan oleh kecerobohan kapal miliknya. Namun, apakah dengan kesanggupan untuk membayar ganti rugi tersebut sudah mampu menyelesaikan masalah? Pahalanya, untuk mengembalikan kerusakan yang

terjadi pada terumbu karang di Raja Ampat itu, membutuhkan setidaknya puluhan tahun.

Kelalaian ini sangat disayangkan oleh banyak pihak. Betapa tidak, Raja Ampat merupakan kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, pulau karang dan dangkalan, serta dikenal sebagai pusat keragaman hayati laut. Bahkan, International Union for Conservation of Nature (IUCN) sebuah organisasi internasional di bidang perkembangan ekonomi dan konservasi alam menyebut Raja Ampat sebagai “Mahkota dari Segitiga Terumbu Karang Dunia”. Itu karena, Raja Ampat memiliki koleksi terumbu karang terkaya di planet bumi. Kekayaan alam yang seharusnya dijaga kelestariannya oleh semua pihak. ●



# KKP Segera Tenggelamkan 70 Kapal Ilegal

**D**irencanakan pada bulan April 2017, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menenggelamkan 70 kapal asing dan eks asing yang berhasil ditangkap oleh Satgas 115 sejak awal 2017. Hal itu dinyatakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Muda TNI A Taufiqerochman pada 15 Maret 2017 di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Yang sudah pasti itu ada 70 kapal, statusnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap tapi April bisa bertambah lagi karena kemarin Armabar (Armada Komando Barat) baru menangkap kapal (ilegal) asal Malaysia,” kata Taufiqerochman kepada wartawan, seperti dikutip oleh CNN Indonesia.

Ketujuh puluh kapal yang akan

ditenggelamkan tersebut memiliki bobot bervariasi, mulai dari 70 gross ton, 120 gross ton dan ada yang berukuran lebih besar. Yang berukuran besar rencananya akan dijadikan monumen agar dapat dilihat masyarakat luas.

Lokasi penenggelaman kapal-kapal ini nantinya akan dilakukan di kawasan di mana kapal-kapal ilegal tersebut ditangkap. Jadi, akan ada yang ditenggelamkan di wilayah perairan Indonesia barat, dan ada pula yang di wilayah perairan Indonesia timur. Penenggelaman ini merupakan bentuk keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberantas kapal perikanan ilegal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Penenggalaman akan dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Satgas 115 yang terdiri KKP, TNI AL, dan Polisi Air

ini akan dilakukan secara serentak di 10 lokasi. Penenggelaman kapal ini seharusnya dilakukan pada awal Maret kemarin, namun harus tertunda karena banyaknya agenda kenegaraan di bulan Maret. “Karena kegiatan negara sedang padat, ada KTT IORA dan kunjungan Raja Salman, maka akan kami lakukan April,” kata Taufiqerochman.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sebelumnya menyatakan selama masa kepemimpinannya, KKP telah banyak menenggelamkan kapal pencuri ikan. Tercatat ada 235 kapal ilegal yang ditenggelamkan oleh pihak KKP sepanjang 2015 dan 2016. “Pencurian ilegal pakai kapal ini berbahaya, makanya kapalnya ditenggelamkan saja,” kata Susi.

Dalam kesempatan lain, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia masih sangat banyak. Bahkan menurutnya, hanya 40 persen penangkapan ikan di Indonesia yang legal. “Masih banyak juga yang tidak tercatat. Di Indonesia ini, yang tercatat paling 30-40 persen saja. Yang tidak tercatat banyak,” kata Susi kepada Tempo di sela-sela World Ocean Summit 2017 di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis, 23 Februari 2017 lalu.

Menurut dia, pemberantasan *illegal fishing* amat diperlukan untuk menjaga aset perikanan tangkap Indonesia yang nilainya cukup besar. Bila hal ini terus dilakukan maka Indonesia bisa menjadi produsen ikan tangkap terbesar di dunia. “Menjaga laut kita sangat penting, Indonesia telah tumbuh perikanan dan tertinggi dalam sejarah. Kita telah mengembalikan neraca perdagangan yang tadinya paling rendah di ASEAN sekarang makin tinggi. Ini sudah benar dan harus diteruskan,” pungkas Susi. ●



Antara



## Gubernur: Gali Hakikat Nilai Kebangsaan

Program Pendidikan Reguler Angkatan LVI (PPRA LVI) telah resmi dibuka pada Rabu, (01/03), di Ruang Dwi Warna Purwa Lt. II Gd. Pancagatra Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya pada upacara pembukaan kegiatan menyampaikan harapan besarnya kepada peserta PPRA LVI untuk mampu menggali nilai hakiki (intrinsik) gagasan kebangsaan yang telah diwariskan pendiri bangsa agar implementatif dengan tantangan kebangsaan sekarang ini.

Selama pendidikan, selain materi inti tentang konsensus dasar kebangsaan, peserta juga akan menerima materi doktrin operasional seputar wawasan nusantara dan ketahanan nasional. “Rumusan kebangsaan yang diwariskan para *founding fathers* bukanlah rumusan mati, tetapi berorientasi ke masa depan. Gali hakikat nilai kebangsaan (dalam rumusan) tersebut, sesuaikan dengan kondisi kekinian dan tantangan kebangsaan saat ini,” ujar Agus Widjojo.

Sebagai lembaga pemerintah yang salah satu fungsinya menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional, menurut Agus, tantangan Lemhannas RI

saat ini adalah bagaimana mengolah materi pembekalan dan pendidikan menjadi materi yang sifatnya implementatif dan validatif untuk mengatasi masalah kebangsaan. Keberhasilan PPRA agar implementatif juga sangat tergantung dari upaya dan kesungguhan dari peserta untuk memberi nilai tambah pada diri masing-masing.

Agus berpesan kepada peserta selama pendidikan 7 bulan ke depan agar tidak hanya mementingkan penilaian akademis, tetapi juga karakter, etika, moral, dan integritas. “Junjung tinggi etika, moral, dan kejujuran yang merupakan prasyarat individu sebagai kader pimpinan tingkat nasional,” pungkas Agus.

Peserta yang mengikuti kegiatan PPRA 56 ini berjumlah 115 orang yang berasal dari berbagai latar belakang antara lain dari kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kejakung RI, Komnas HAM, Kopertis, ormas, parpol, kalangan bisnis, dan juga peserta mancanegara. Negara sahabat yang mengirimkan perwakilannya dalam pendidikan ini adalah Srilanka, Pakistan, Kamboja, Vietnam Fiji, Singapura, Zimbabwe, Laos, Timor Leste, Saudi Arabia, dan Malaysia. Keberagamam latar belakang ini menjadi modal bagi para peserta untuk menambah jaringan, memperluas cakrawala, dan membangun

kerja sama.

“Dinamika Sosial Budaya sebagai Tantangan Ketahanan Nasional” dipilih sebagai tema selama pendidikan. Tema ini berkaitan dengan perlunya penguatan gatra sosial budaya. Menurut hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) tahun 2016, gatra politik menunjukkan kondisi kurang tangguh. Gatra politik ini mempengaruhi kondisi gatra-gatra lainnya, berpotensi menimbulkan gesekan sosial dan benturan kepentingan antar kelompok. Pemahaman nilai-nilai kebangsaan di masyarakat juga mengalami penurunan. Kondisi ini mempengaruhi dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Upacara pembukaan kegiatan PPRA LVI ini selain dihadiri oleh pimpinan Lemhannas RI, juga dihadiri oleh undangan dari negara sahabat dan beberapa pimpinan lembaga. Turut hadir Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, Wakil Kepala Staff AU (Wakasau) Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Komjen Pol Basyaruddin, dan Mantan Gubernur Lemhannas RI Prof. Ermaya Suryadinata. ●



# Lemhannas RI Selenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Tarakan

Sebagai upaya untuk memelihara nasionalisme dan menjaga nilai-nilai serta wawasan kebangsaan, Kedeputan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menggelar kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto, Rabu (01/3), di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza.

Dalam sambutan Gubernur Lemhannas RI, yang dibacakan oleh Dedy Yulianto disampaikan bahwa di tengah arus globalisasi dan proses demokratisasi yang sedang kita jalani saat ini, penguatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan merupakan kebutuhan mutlak, agar bangsa ini tidak terjebak dalam euforia demokrasi yang justru bergerak menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa.

“Hal ini sangat perlu dipahami oleh para peserta sekalian, mengingat peran penting saudara dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, beretika dan bermartabat. Kita tidak menginginkan, proses demokrasi justru melemahkan nilai dan jati diri bangsa yang bercirikan semangat kegotong-royongan,” ujar Dedy.

Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini juga menyampaikan perlunya nilai-nilai dan wawasan kebangsaan, terutama di Kalimantan Utara.

Irianto mengungkapkan, “Dengan kemajemukan dan keragaman suku,



budaya, bahasa, etnis, golongan dan agama, disatu sisi merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa. Namun di sisi lain, mengandung potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi titik retak persatuan dan kesatuan bangsa. Letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berada di daerah perbatasan menjadikan kondisi yang rawan akan tindak kriminalitas, pencurian ikan, narkoba, dan perampokan, sehingga menjadi tanggungjawab kita bersama dalam menjaga dan mengelola nilai-nilai kebangsaan. Tidak ada artinya nilai-nilai kebangsaan ini hanya kita diskusikan pada kegiatan ini tanpa adanya implementasi/praktek dalam kehidupan sehari-hari.”

Kegiatan ini diikuti 100 peserta, yang terdiri dari 34 orang dari kalangan birokrat, 28 orang dari akademisi/guru/dosen, dan 38 orang

dari tokoh masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 7 hari dengan *outbound* dan menggunakan metode pemantapan melalui ceramah, diskusi, pembinaan peserta, praktek mengajar dengan mengangkat tema “Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa guna meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Kapolda Kalimantan Utara, Danlanud Tarakan, Danlantamal XIII Tarakan, Sekda Kota Tarakan, Ka Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Dandim Tarakan, Rektor Universitas Borneo Tarakan dan beberapa pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI. ●



## *The United Kingdom DCDC kunjungi Lemhannas RI*

**D**elegasi The United Kingdom Development, Concept, and Doctrine Centre (DCDC) yang dipimpin oleh Commodore Rhett Hatcher mengunjungi Lemhannas RI pada Kamis (23/2). Kunjungan tersebut diterima oleh Deputy Pengkajian Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. yang didampingi oleh Direktur Pengkajian Internasional Agus Budijarto, S.H., M.Hum., dan Kolonel Lek Rujito D. Asmoro, Gdipl In Ds., M.A., R.C.D.S. bertempat di Ruang Tamu Deputy, Gedung Astagatra Lt. IV, Lemhannas RI.

Dalam pertemuan tersebut, Hatcher menyampaikan bahwa DCDC adalah sebuah organisasi Think Tank (tangkai pemikiran) yang terdiri dari tiga pilar yaitu masa depan, konsep, dan doktrin. Di dalam DCDC terdiri dari Tim Hukum, Tim Analisis Strategi, Tim Penelitian dan memiliki 65 staf berada di bawah

Kementerian Pertahanan Inggris dan terdiri dari unsur militer dan sipil.

Selain itu, lanjut Hatcher, DCDC juga didukung dari unsur akademik seperti Oxford University, Yale University dan London University. Hatcher juga mengungkapkan bahwa DCDC juga lebih berfokus pada mengembangkan *scanning*, cara berpikir konseptual dan selalu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Hatcher juga menjelaskan mengenai *output* yang telah dihasilkan yaitu program “Global Strategic Trends” yang telah berjalan secara berkelanjutan dan beberapa produk spesifik yang dihasilkan secara berkala. Salah satu *output* terbesar yang pernah dihasilkan adalah “Global Strategic Trends out of 2045” yang telah mulai diproduksi sejak 2015 dan berlanjut hingga 2045.

Global Strategic Trends out of 2045 tersebut diproduksi setiap lima tahun

dan disesuaikan dengan keadaan pemerintah Inggris terkini serta untuk menyegarkan dan memperbaharui strategi keamanan nasional di sana.

Setelah beriskus mengenai peran dan fungsi DCDC, Djagal Wiseso Marseno memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi Lemhannas RI melalui pemutaran video profil dan penjelasan singkat. Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai berbagai kajian yang telah dilakukan oleh kedua lembaga.

Hadir mendampingi Deputy Pengkajian yaitu Direktur Pengkajian Internasional Lemhannas RI Bagus Budijarto, S.H., M.H., Kepala bagian Kerja Sama Internasional Kolonel Lek Rujito D. Asmoro, Gdipl In Ds., M.A., R.C.D.S. serta 4 peserta delegasi DCDC. Diskusi tersebut kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama. ●



## *Kunjungan SMAN I Padang Ke Lemhannas RI*



**P**ada Jumat (24/2) Rombongan siswa kelas XI IPS Unggul SMAN I Padang melakukan kunjungan ke Lemhannas RI yang disambut oleh Kepala Bagian Humas Dr. Wahyu Widji Pamungkas, S. Kom, M.M. di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra Lantai III, Lemhannas RI.

Dalam pertemuan tersebut, Aminah selaku perwakilan guru SMAN I Padang menyebutkan bahwa kunjungan ini adalah salah satu dari rangkaian *study tour*. Kunjungan ke Lemhannas ini dimaksudkan sebagai salah satu pembelajaran bagi para siswa mengenai bagaimana sebuah lembaga pemerintah bekerja dan juga

mengetahui lebih mendalam mengenai ketahanan nasional Indonesia.

“Mudah-mudahan mengenai dialog nanti anak-anak dapat memiliki bekal yang lebih yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah,” ujar Aminah.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu Widji mengucapkan selamat datang kepada para siswa dan guru dari SMAN 1 Padang. Selain itu, Wahyu Widji juga menjelaskan secara mendetail mengenai sejarah, visi, misi, tugas, dan fungsi Lemhannas RI. Wahyu Widji juga memaparkan mengenai cita-cita Lemhannas RI untuk menjadi Lembaga berkelas dunia. Paparan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan para siswa.

Sebelum menutup paparannya, Wahyu Widji berpesan agar para siswa melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Sebagai siswa, lanjut Wahyu Widji, para siswa SMAN 1 Padang memiliki tugas utama untuk belajar. Selain itu, Wahyu Widji juga berpesan bahwa tantangan ke depan bangsa ini semakin berat dengan adanya teknologi yang semakin maju, maka sebagai generasi muda para siswa harus mampu memilah informasi yang baik dan buruk serta menggunakan media sosial dengan bijak. Kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan tukar menukar cenderamata. ●

**Dr. Yulianus Pongtuluran, M. Ed**

Direktur Program Pendidikan

Kedeputian Pendidikan Lemhannas RI

# *Bahagia di Dunia Pendidikan*

*The right man on the right place.* Orang yang tepat di tempat yang tepat. Kalimat inilah yang pas menggambarkan sosok Yulianus Pongtuluran. Di Lemhannas RI, pria asal Toraja ini menjabat sebagai Direktur Program Pendidikan, Kedeputian Pendidikan. Selaras dengan jabatannya itu, ia sebelumnya sudah menyelesaikan studi S2 bisnis pendidikan di University of Idaho AS, serta menamatkan S3 kebijakan publik di Universitas Gadjah Mada. Jelas, kemampuannya di bidang pendidikan tak perlu diragukan. Pas untuk jabatan yang diterimanya saat ini di Lemhannas.

Makin pas lagi, karena ternyata sejak kecil Yulianus hidup di tengah keluarga yang sarat pengalaman di bidang pendidikan. “Banyak anggota keluarga saya yang memiliki latar belakang di bidang pendidikan. Kakek saya adalah dosen, orang tua dan mertua saya guru, dan kakak saya dosen,” ujar Yulianus sambil tersenyum.







Tak hanya itu. Lulusan S1 jurusan ekonomi Universitas Mulawarman ini pun begitu gemar mengajar. Sepulang bekerja di Lemhannas, malam hari ia mengajar di Fakultas Ekonomi Trisakti Jakarta. “Bagi saya mengajar itu memiliki kesenangan tersendiri. Saya bahagia ketika apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya dapat diaplikasikan oleh mereka, nilainya tidak terhingga,” ucap pria yang hobi membaca buku ini.

Bagi Yulianus, dunia pendidikan adalah dunia yang menantang. Itu karena, dirinya selalu ingin tahu dan berusaha untuk tahu tentang apa yang terjadi di sekitar dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan terus belajar, menurutnya, seseorang akan semakin mampu memaknai hidup. Selain itu, dunia pendidikan juga menjadi sarana bagi dia untuk berbagi kepada sesama, terutama berbagi ilmu.

Meski begitu, Yulianus mengakui bahwa bertugas di Lemhannas RI cukup berbeda dengan apa yang ia lakukan sebelumnya ketika bekerja sebagai pengajar di kampus. Pada Direktorat Program Pendidikan Lemhannas, ia berkecimpung dengan hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi sehingga ia tidak bisa mengambil keputusan tanpa berpikir jauh terkait dampak dari keputusan yang ia ambil. Berbeda dengan di kampus, sebagai dosen atau akademisi ia bisa bebas mengkritik sebuah kebijakan, bebas memberi semangat kepada mahasiswanya untuk melakukan koreksi kepada pemerintah, dan sebagainya.

Bekerja di Lemhannas merupakan pengalaman yang istimewa bagi ayah dari empat orang putri ini. Sebab, Lemhannas menurutnya adalah lembaga yang berkelas dan unik. Di lembaga ini bisa bertemu antara

kalangan praktisi dari TNI, Polri dengan kalangan akademisi. Pengalaman dari para praktisi di lapangan baik pimpinan TNI, Polri, bersinergi dengan baik dengan kajian teoritis dari para akademisi. Hanya di Lemhannas keduanya bisa dipadukan sehingga ada kolaborasi yang positif.

Seperti diketahui, Lemhannas menyelenggarakan beberapa program pendidikan, yaitu Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) selama 7 bulan, Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) selama 5 bulan, dan pendidikan singkat selama 2 bulan. Di Direktorat Program Pendidikan, tugas Yulianus adalah menyediakan program untuk peserta pendidikan di Lemhannas datang dari berbagai kalangan pemimpin dengan latar belakang dan level pendidikan yang berbeda-beda, dan dari profesi beragam. Mulai dari kalangan TNI AD, TNI AL,



TNI AU, Polri, sipil, partai politik, LSM, dan tokoh masyarakat, dan bahkan juga pimpinan dari negara lain.

Begitu bervariasinya peserta didik, maka direktorat yang dipimpin oleh Yulianus harus mampu merancang satu model pendidikan yang tepat bagi semua peserta, melalui kurikulum dan anggaran yang ada. Selama tujuh bulan belajar PPRA, Yulianus harus memastikan bahwa semua peserta dapat menyerap berbagai materi bidang studi inti yang terdiri dari enam bidang studi, bidang studi gatra, lingkungan strategis, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Itulah tantangannya. Bagaimana meramu materi kurikulum dengan tepat bagi semua peserta yang majemuk tadi, sehingga bisa menghasilkan lulusan pemimpin yang berkarakter, negarawan dan mampu menyelesaikan masalah-masalah regional maupun internasional.

“Tantangan bagi kami untuk membuat materi yang mampu diserap

dan diterima oleh semua peserta didik, serta kami harus mencari penceramah-penceramah yang tepat dan berkualitas dan kompeten baik dari dalam maupun dari luar Lemhannas,” jelas Yulianus.

Ke depan, pria ini akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja direktorat yang dipimpinnya. Untuk mencapai itu, ada beberapa cara yang ia terapkan. Antara lain, dengan melakukan terobosan-terobosan, terutama dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi. Selain itu, ia juga terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan kerjanya, misalnya dengan menganjurkan bawahannya untuk memperbanyak baca dan belajar.

“Mengoptimalkan yang sudah ada saat ini, bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik, *upgrade* pemikiran, saling memotivasi, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, dan belajar dari kesalahan,” kata Yulianus saat menjelaskan upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM

di direktorat yang dipimpinnya.

Meski kerap menghadapi tugas yang tidak ringan di Lemhannas, Yulianus ternyata termasuk orang yang tak suka membesar-besarkan masalah. Ia pun tak pernah terbebani untuk mengejar sukses. Sukses baginya adalah sebuah perjalanan. Karenanya ia lebih suka bekerja sambil menikmati hidup. Ia pun memberi tips singkat agar dapat hidup sukses dan bekerja dengan baik. Pertama, apa yang bisa dilakukan hari ini, lakukan dengan baik. Lalu, jika melakukan kesalahan hari ini jangan diulangi lagi. “Kunci sukses adalah *self-awareness* kita sendiri, jadi jangan menyalahkan orang lain. Sukses itu adalah ketika kita sadar apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita,” ujar Yulianus.

Berbekal kiat bekerja yang tanpa beban itu, maka tak heran jika Yulianus terus bahagia bekerja di dunia pendidikan. ●



## Siti Fadillah, SE, M. Sc.

Kepala Sub Bagian Akunting  
Biro Perencanaan dan Keuangan  
Lemhannas RI

# *Belajar dari Setiap Tahapan Kerja*

**K**arir, bukanlah tujuan utama wanita ini dalam bekerja. Bekerja, menurut Siti Fadillah adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengamalkan ilmu yang ia miliki, untuk mengabdikan diri kepada negara, serta untuk beribadah kepada Tuhan. “Bekerja ikhlas saja, tidak terbebani harus mengejar karir, jabatan atau gaji yang tinggi. Saat kita meniatkan bekerja itu untuk Tuhan dan negara, maka tidak akan ada beban, dan tiap hari bisa bekerja semangat,” jelas Fadhillah.

Kiat yang sekilas terkesan tanpa ambisi itu ternyata justru membawa wanita yang biasa disapa Dilla ini sukses dalam bekerja. Simak saja. Di usia yang terbilang muda, yaitu 29 tahun, ia sudah diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Akunting di Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI. Tak hanya itu. Ia bahkan juga menerima beasiswa dari Lemhannas RI dan menyelesaikan studi S2 jurusan *defence*, program studi Ketahanan Nasional, Fakultas Multidisiplin Universitas Gajah Mada.

Padahal, saat awal terjun ke Lemhannas pada tahun 2009 Dilla cukup sulit menyesuaikan diri. Meskipun ia adalah lulusan sarjana S1 jurusan Akunting Universitas Padjadjaran Bandung, dan ia pun ditugaskan di bagian keuangan di Lemhannas, ternyata dunia kerja sangat jauh berbeda dengan teori-teori yang sebelumnya ia pelajari di kampus. Namun, berkat kemauannya untuk selalu belajar, wanita asli Bandung ini akhirnya dapat mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. “Kalau diminta bekerja, kalau saya mampu akan saya kerjakan,

kalau tidak mampu, maka saya cari tahu, saya bertanya,” ujar Dilla.

Wanita yang lahir pada 24 Maret 1985 ini menambahkan, bahwa dirinya selalu menganggap semua tahap yang ia lewati dan ia kerjakan adalah pembelajaran yang penting. Karena itu, setiap tahapan selalu merupakan pembelajaran yang menarik baginya.

Meskipun begitu, Dilla juga kerap menemui tantangan yang tak ringan saat bertugas di Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI. Salah satunya adalah, menyelaraskan antara aturan baku dengan kenyataan atau kebutuhan yang ada di lapangan. Seperti diketahui, fungsi bagian keuangan di Lemhannas adalah sebagai pendukung bagi setiap unit kerja di Lemhannas. Artinya, sejatinya bagian keuangan ini membantu kelancaran tugas semua unit kerja di Lemhannas dengan cepat. Namun, dalam melaksanakan tugasnya kerap kali biro perencanaan dan keuangan harus dihadapkan pada benturan antara aturan yang ada, dengan kenyataan di lapangan. “Kadang antara aturan keuangan dan kenyataan yang ada di lapangan berbeda. Untuk itu harus ada sistem yang mudah dipahami dan nyaman untuk semua unit kerja di Lemhannas,” jelas Dilla.

Beruntung, ketika bekerja di Lemhannas wanita yang dikaruniai dua anak lelaki kembar ini mendapat dukungan penuh dari suaminya. Saat harus lembur di kantor, suaminya tak

berkeberatan. Begitu pula saat Dilla memilih untuk melanjutkan kuliah S2. Karena itu, ia selalu berusaha memanfaatkan waktu senggangnya bersama kedua anak kembar serta suaminya.

Ke depan, Dilla berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali menambah wawasan dan pengetahuannya dengan berkuliah lagi, melanjutkan ke jenjang S3. Bukan untuk mengejar karir, melainkan untuk bekerja sesuai definisi yang ia yakini, yaitu bekerja sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, untuk mengamalkan ilmu yang ia miliki, untuk mengabdikan diri kepada negara, serta untuk beribadah kepada Tuhan. ●



*Mohammad Ramdhan Pomanto*

*Mencipta Smart City  
Yang Punya Hati*





Saat ini, sudah banyak kepala daerah di Indonesia yang mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mengubah kota-kota di wilayahnya menjadi “kota pintar” yang biasa disebut *smart city*. Meskipun begitu, tak banyak kepala daerah yang bisa meramu *smart city* bukannya sehingga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat di wilayahnya. Nah, salah satu yang betul-betul bisa menerapkan teknologi *smart city* yang tinggi manfaatnya bagi masyarakat di wilayahnya, adalah Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Demikian istimewanya *smart city* yang ia terapkan, hingga walikota yang akrab disapa Danny itu kerap menuai penghargaan. Yang terbaru, adalah penghargaan sebagai Kepala Daerah Terbaik Indonesia 2017 pilihan Majalah Tempo, pada Maret 2017 ini.

Lalu, apa istimewanya *smart city* di Makassar? Jawabannya sederhana: Pendekatan penggunaan teknologinya yang berbeda. Tidak seperti kebanyakan *smart city* yang lain, Danny memilih pendekatan *bottom up*. Bentuknya adalah dengan memadukan teknologi atau *hardware* dan *software smart city* dengan nilai budaya Makassar sebagai “*heartware*”. Nilai budaya tersebut adalah *Sombere* yang dalam bahasa Makassar berarti keramahan.

Pendekatan ini sengaja dipilih agar masyarakat mau berpartisipasi memanfaatkan fasilitas *smart city*. Karena, tanpa partisipasi masyarakat *smart city* tidak akan berjalan. Sebab itulah, maka sebelum mengaplikasikan teknologi informasi, mantan dosen jurusan arsitektur Universitas Hasanuddin ini lebih dulu menginventarisir masalah-masalah yang ada di Makassar. Baru kemudian dibuatkan solusinya dalam bentuk aplikasi-aplikasi teknologi informasi.

Dari riset yang ia lakukan selama kurang lebih 8 bulan, ia menyimpulkan bahwa masalah utama warga Makassar adalah kesehatan. Jika ia membuat solusi kesehatan berbasis aplikasi TI, ia yakin akan bisa menyentuh hati masyarakat untuk mau memanfaatkan layanan *smart city* itu. Maka, ia buatlah solusi

kesehatan berbasis teknologi informasi.

Aplikasi pertama adalah Makassar *Smart Card*. Yaitu, aplikasi kartu pintar multifungsi yang wajib dimiliki semua warga. Ini merupakan kartu identitas warga yang dapat juga berfungsi sebagai kartu atm, dan debit. Tapi yang lebih penting, *smart card* ini juga memuat rekam jejak medis warga. “Di dalamnya ada semuanya, mulai dari ATM, *debit card*, hingga *medical record*. Saya sendiri tak pegang uang, *smart card* saya dibawa istri dan saya tak bisa bohong soal gaji,” jelas Danny sambil tertawa, saat ia menjadi pembicara dalam acara Goesmart di Grand City Surabaya, pada akhir 2016 lalu.

Aplikasi berikutnya yaitu *smart home care*. Yaitu, pelayanan kesehatan bergerak 24 jam berupa ambulans kecil yang datang langsung ke rumah-rumah warga. Istimewanya, ambulans kecil yang diberi nama “Dottorota” (Dokter Kita, dalam bahasa Makassar) ini terhubung secara *online* dengan pusat kendali, dan juga ke puskesmas dan rumah sakit di Makassar. Jadi, hasil pemeriksaan pasien di monitor ambulans kecil ini masuk ke dalam rekam medis warga di dalam *smart card*, dan juga bisa langsung diakses oleh dokter. Bagi pasien jantung misalnya, data medis pasien berupa rekaman EKG bisa dikirim oleh petugas Dottorota ke *server* pusat, lalu diteruskan ke dokter ahli. Setelah

itu, diagnosanya akan dikirim dokter lalu diterima melalui layar *smartphone* milik petugas yang ada di rumah pasien. Canggih bukan?

Uniknya lagi, Danny memodifikasi layanan kesehatan mobil ini dengan kondisi nyata kota Makassar. Ia sengaja memilih mobil mungil LCGC yaitu Suzuki Karimun Wagon R, sebagai ambulans. Tujuannya, agar layanan Dottorota ini bisa leluasa masuk rumah-rumah pasien sampai ke kampung yang padat penduduk. Jadi, warga yang tinggal di gang sempit sekalipun, saat membutuhkan layanan kesehatan atau butuh jemputan ambulans ke rumah sakit dan Puskesmas tinggal menghubungi ke nomor layanan *home care* Dottorota di *call center* 112, tak lama kemudian petugas kesehatan datang ke depan pintu rumah.

Tiap puskesmas memiliki satu mobil Dottorota, dan kini sudah ada 48 unit Dottorota yang beroperasi di Kota Makassar. Meski berbadan kecil, di dalamnya terdapat peralatan standar ambulans, seperti tabung oksigen, alat infus, obat-obatan, alat monitor Elektrokardiogram (EKG) dan Ultrasonografi (USG). Danny mengklaim, aplikasi *home care* ini telah melayani 5.000 warga, dan sukses menurunkan jumlah pasien di rumah sakit di Makassar hingga 80 persen.





tribunews.com

Prestasi pria yang merancang desain Masjid Terapung Amirul Mukminin di Pantai Losari Makassar ini kemudian mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Buktinya, keberhasilan layanan kesehatan *mobile* di Makassar ini kemudian diboyong ke skala nasional oleh Kementerian Kesehatan RI, sebagai program Telemedika Nusantara.

Berikutnya Danny tengah berupaya merealisasikan aplikasi Smart RT/RW. Melalui aplikasi ini Danny berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dengan aplikasi *smartphone* berbasis android. Pada 2017 ini ia akan melengkapi seluruh aparat daerahnya dengan *smartphone*, hingga ke tingkat RW dan RT. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 5.969 ketua RT dan ketua RW se-Makassar akan mendapatkan *smartphone* masing-masing seharga 1,5 juta-an. Nantinya, melalui *smartphone* setiap Ketua RT dan Ketua RW di kota Makassar dapat melaporkan berbagai kejadian di wilayahnya, seperti kelahiran warga atau kematian warga secara *real time online*, untuk kepentingan pembaruan data kependudukan dan catatan sipil secara cepat.

Selain itu, Makassar juga sukses memberdayakan masyarakat dengan program *alleyways*. *Alleyways* berarti gang sempit atau lorong. Melalui program ini, masyarakat diajak untuk memanfaatkan gang-gang di lingkungannya dengan menanam tanaman yang bisa dikonsumsi atau dijual, seperti cabai.

Gang-gang sempit yang dulunya kumuh, dengan partisipasi aktif warga diubah menjadi Lorong Garden yang bersih, indah dan produktif dengan penanaman sayuran maupun pohon cabai secara vertikal. “Kita mulai dari lorong karena masyarakat kecil ada di lorong, kemiskinan ada lorong. Karena itu yang pertama kita lakukan adalah kita berdayakan masyarakat lorong, kita didik masyarakat lorong,” kata Danny.

Saat ini dari 7.500-an lorong yang ada di Makassar, sekitar 60 persennya sudah berubah menjadi Lorong Garden yang produktif dan menghasilkan sayur-mayur serta cabai, yang bisa dikonsumsi sendiri oleh warga. Tahap berikutnya, lorong garden ini akan ditransformasikan menjadi Lorong-lorong Garden yang produktif, memberi penghasilan bagi warga, sehingga meningkatkan ekonomi warga Makassar.

Untuk mendukung rencana itu, akhir tahun 2016 lalu Danny meluncurkan program Badan Usaha Lorong atau BULO. Nantinya, BULO akan mendukung perekonomian dari sekitar 7.500 lorong yang ada di Makassar. Sebagai tahap awal BULO menyasar 500 Lorong Garden yang telah produktif menghasilkan cabai. Panen yang dihasilkan oleh lorong garden akan dibeli oleh pemerintah kota melalui BULO, dan hasil penjualannya akan dikembalikan ke masyarakat. Bentuknya, sebagai tabungan yang sebagian digunakan untuk dana pendidikan

anak-anak lorong, dan sebagian lainnya akan digunakan sebagai modal untuk mengembangkan BULO di setiap kecamatan. Menurut hitungan Danny, jika semua lorong di Makassar yang jumlahnya sekitar 7.500 lorong itu dimanfaatkan, potensinya bisa mencapai Rp 10 triliun per tahun.

Program ini juga telah mengundang decak kagum Menteri Pertanian RI, sehingga Kementerian Pertanian langsung menegaskan komitmennya untuk memasok seluruh bibit cabai untuk tahap awal program BULO ini.

Tak hanya itu. Makassar juga telah menjalankan *Smart city* di bidang keamanan, melalui *care and rescue center*. Ada 69 kamera CCTV yang terpasang di berbagai sudut kota Makassar. Bahkan ke depan pihak pemkot akan melibatkan pihak swasta. Gedung-gedung swasta itu nantinya diwajibkan memasang kamera pengawas ke arah jalan.

Ada pula program *waste management* untuk mengelola pembuangan sampah. Truk-truk sampah dipasang GPS, sehingga dapat dimonitor pergerakannya. Totalnya ada 150 truk sampah ber-GPS ini. Lalu, Yang lebih penting, partisipasi warga di program ini sangat tinggi. Dengan program ini, warga bisa menjual sampahnya untuk ditukar dengan uang atau beras di bank sampah. Hebatnya, hingga sekarang di Makassar ada sekitar 320 bank sampah, jumlah bank sampah yang terbanyak se-Indonesia.

Berbagai aplikasi *smart city* ini terhubung online ke ruang khusus yang dinamakan *war room*, atau pusat pemantau di menara kantor pemkot Makassar. Jadi mulai dari pergerakan truk sampah, gambar CCTV, pergerakan ambulans Dottorota, sampai data kependudukan *realtime*, rekam medis warga, bisa diakses dan dikelola di sini. Dengan begitu, masyarakat Makassar bisa menikmati beragam kemudahan fasilitas *Smart City* yang diciptakan dengan sepenuh hati. ●



# Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru

Penulis : M. Arief Pranoto, dan Hendrajit  
Penerbit : Global Future Institute  
Cetakan : Pertama, Desember 2016  
Tebal Buku : 234 Halaman



**B**uku ini sangat menarik bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perang asimetris, perang hibrida, perang *proxy*, dan kolonialisme baru, yang menurut penulis buku ini sudah lama terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Apalagi, buku ini tidak hanya menjelaskan secara teoritis tentang definisi perang asimetris dari berbagai sumber, tapi juga langsung memberikan contoh-contoh perang asimetris di beberapa negara, seperti di Libya, Suriah, Afghanistan, dan Indonesia.

Yang juga penting, melalui buku ini kedua penulisnya yang merupakan pengamat geopolitik internasional ini juga berupaya menumbuhkan rasa nasionalisme pembaca dengan ‘menyadarkan’ pembaca bahwa Indonesia sangat rentan menjadi korban perang asimetris. Terutama, sejak masa pemerintahan orde baru. Tidak tanggung-tanggung, buku ini berani memaparkan informasi sejarah, terkait bagaimana latar belakang terjadinya konspirasi penjajahan gaya baru disusun oleh negara-negara adidaya terutama blok barat, dan negara berkembang seperti Indonesia kemudian masuk dalam perangkapnya.

Setelah perang dunia II berakhir, negara-negara imperialis yang dipelopori

oleh Amerika Serikat dan Inggris terbukti masih belum mengakhiri era penjajahan terhadap negara-negara yang baru merdeka. Mereka tetap ingin melanggengkan penjajahan terhadap negara-negara berkembang, hanya bentuknya saja yang beralih, semula berupa kolonialisme klasik kini menjadi neo kolonialisme.

Untuk menjalankan skema penjajahan gaya baru ini negara-negara barat kemudian menciptakan konsep dan strategi perang gaya baru pula, yang dinamakan perang asimetris. Secara sederhana perang asimetris berarti bentuk perang yang dilakukan secara non-militer dari negara maju, untuk menghancurkan negara lain (terutama negara berkembang yang relatif lebih lemah) melalui bidang ideologi, politik, sosial-budaya dan hankam. Jadi perang ini meluas tak hanya di lingkup adu kekuatan bersenjata, tapi juga non senjata. Bahkan, di era globalisme liberal seperti saat ini, pemerintah negara ‘penjajah’ seringkali tidak menjadi aktor utama. Yang berperan justru kekuatan aktor non negara seperti korporasi multinasional yang punya SDM dan keuangan yang melimpah.

Sasaran penting perang asimetris ini

ada tiga. Pertama, membelokkan sistem suatu negara sesuai arah kepentingan neo kolonialisme. Kedua, melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat negara yang akan dikuasai. Ketiga, menghancurkan ketahanan pangan dan ketahanan energi bangsa yang jadi sasaran, dan selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target terhadap negara penjajah, dalam hal ketahanan pangan dan energi. Sedangkan muara ketiga sasaran itu adalah kontrol ekonomi dan penguasaan sumber daya alam negara sasaran.

Ingin tahu seperti apa negara-negara barat menjalankan perang asimetrisnya terhadap bangsa Indonesia? Buku ini mengupas tuntas semua, mulai dari latar belakang munculnya konsep penjajahan gaya baru, sampai ke detail strategi dan langkah perang asimetris yang dijalankan, bahkan sampai pada lembaga-lembaga dunia, serta korporasi multinasional yang terlibat dalam skema penjajahan modern negara barat atas Indonesia.

Tak ketinggalan, buku ini juga mengupas tuntas contoh-contoh perang asimetris yang dijalankan negara-negara maju terhadap beberapa negara berkembang lainnya di dunia. ●

# *Melihat Konflik dari Sudut Pandangan Berbeda*



**B**eberapa tahun terakhir ini, cukup sering terjadi konflik sosial di berbagai penjuru Indonesia. Tengok saja. Pada bulan Januari 2012 terjadi kerusuhan sosial dan pembakaran kantor Bupati Bima NTB, kemudian pada Februari 2012 ada kerusuhan sosial di Biromaru, Sigi Sulawesi Tengah. Selain itu, masih ada lagi konflik sosial di NTB pada Januari 2013, lalu di Sleman Jogjakarta pada Juni 2014, serta konflik di Tolikara Papua pada Juli 2015. Kemudian, baru-baru ini juga muncul potensi konflik akibat isu SARA pada pilkada DKI Jakarta 2017.

Itu semua menunjukkan satu hal yang pasti: Bahwa, kesadaran kita sebagai satu bangsa yang sama meskipun terdiri dari beragam suku, agama, ras, sudah melemah. Akibatnya, perpecahan sangat berpotensi terjadi di Indonesia. Jika konflik terus terjadi, keamanan dalam negeri melemah, pembangunan sulit berjalan, perekonomian sulit bergerak, kesejahteraan masyarakat semakin sulit tercapai. Jadi jelas, konflik sesama anak bangsa sangat merugikan Indonesia.

Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk menghindari konflik? Tumbuhkan kembali persatuan bangsa, dengan

mencoba melihat permasalahan konflik dari sudut pandang yang berbeda.

Jika dilihat dari perspektif yang lebih lebar, hampir setiap terjadi perpecahan dan konflik, biasanya di sisi lain ada pihak lain yang akan mengambil keuntungan dari perpecahan itu. Maka, bukan tidak mungkin jika isu penyebab perselisihan dan perpecahan yang kemudian membesar menjadi konflik-konflik sosial itu sebenarnya sengaja dihembuskan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dari perpecahan Indonesia. Lalu pihak manakah yang mungkin melakukan itu?

Berdasarkan sejarah, Indonesia sudah punya banyak pengalaman pahit terpecah-belah akibat adu domba negara asing yang menjajah bumi Nusantara. Dengan mengadu domba dan memecah belah Indonesia maka kolonial Belanda melemahkan kekuatan persatuan Indonesia. Selanjutnya, dengan kekuatan militer mereka berhasil menjajah negeri ini selama beratus-ratus tahun. Tujuan negara asing itu, adalah merampas sumber daya alam Indonesia untuk dibawa ke negeri mereka, untuk kepentingan negeri mereka.

Indonesia kini telah merdeka, bebas dari penjajahan. Namun, kekayaan

sumber daya alam Indonesia yang melimpah hingga kini masih jadi incaran banyak negara asing. Ini lantaran, tak semua negara dikaruniai sumber daya alam melimpah seperti Indonesia. Tak heran mereka berusaha mendapatkannya dari Indonesia, dengan cara yang lebih mudah dan lebih murah. Apalagi ketika mereka melihat adanya peluang untuk bisa merebut kekayaan alam Indonesia itu dengan mudah.

Menjajah, mencaplok wilayah kedaulatan melalui serangan militer memang sudah tak lagi dilakukan. Namun, mendapatkan kekayaan alam Indonesia dengan lebih mudah dan murah, bisa jadi masih dijalankan hingga sekarang, tetapi lewat cara yang berbeda. Menjajah dengan cara non-militer, melainkan menjajah lewat jalur ekonomi, ideologi, politik dan sosial budaya. Caranya beda tapi tujuannya sama, merampas kekayaan alam Indonesia. Untuk mengaburkan tujuan dan agenda tersembunyi ini, negara asing berusaha mengalihkan perhatian bangsa Indonesia dengan melempar isu lain yang bisa menimbulkan perselisihan dan konflik antara sesama bangsa Indonesia. Ketika bangsa ini



# AGAMA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## NATIONAL RESILIENCE INSTITUTE OF REPUBLIC OF INDONESIA

sibuk berselisih paham dengan sesama, pihak asing pun leluasa merampok sumber daya alam Indonesia.

Contoh konflik SARA yang terjadi di Sampang, Madura. Pada bulan Agustus 2012, konflik antara masyarakat Sunni dan penganut Syiah terjadi di Sampang. Puluhan rumah penduduk Syiah habis terbakar dan puluhan warga luka-luka. Penyebabnya adalah kemarahan warga Sunni yang tak mau menerima warga Syiah yang dianggap sesat dan harus dibai'at masuk ke dalam ajaran Sunni.

Tapi, mari kita coba membuka mata dan melihat dengan sudut pandang yang lebih lebar. Madura, yang selama ini lebih populer sebagai daerah penghasil garam, sebenarnya merupakan wilayah penghasil migas yang tak sedikit, baik di daratan Madura maupun di lepas pantai. Salah satu blok migas di sana, yakni Blok West Madura di wilayah utara Bangkalan mampu menghasilkan 14 ribu barel minyak setiap harinya. Itu artinya satu blok saja menghasilkan sekitar USD 1,4 juta per hari atau sekitar Rp 19 miliar per hari. Bayangkan betapa banyaknya jumlah yang dihasilkan dalam satu bulan, atau bahkan satu

tahun? Belum lagi, di blok yang sama juga terdapat gas alam sebanyak 113 juta kaki kubik dengan harga USD 2,8 per meter kubik. Dan, itu baru dari satu blok saja, padahal di Madura ada sekitar 17 blok migas yang masih bisa dimaksimalkan produksinya. Baru dari satu titik migas yang sudah beroperasi maksimal saja, Madura sudah mampu memasok hingga 70 persen kebutuhan migas di Jawa Timur.

Berdasarkan fakta ini, pengamat geopolitik internasional Hendrajit beranggapan bahwa bukan tidak mungkin isu SARA Sunni-Syiah di Madura sengaja dihembuskan oleh pihak asing yang ingin mendapatkan hak ekonomi atas sumber daya migas di Madura. Apalagi, menurut Yayasan Masyarakat Giligenting, dari sekian banyak operator migas yang beroperasi di 17 blok migas Madura, hampir 90 persen dikuasai oleh perusahaan asing.

Jadi, menurut Hendrajit, bukan tidak mungkin bahwa konflik Sunni dan Syiah di Sampang sengaja dihembuskan oleh pihak asing, sehingga bangsa ini teralihkan, dan lengah. Bahwa sebenarnya Madura tengah menjadi incaran kekuatan

ekonomi asing yang tengah berbagi manisnya kue migas Madura yang melimpah, dengan harga yang murah.

Walaupun semua asumsi di atas tadi masih perlu pembuktian lebih jauh, sudah saatnya kita mawas diri dan menyadari kemungkinan adanya agenda asing yang merugikan negeri ini. Lupakan perbedaan kepentingan masing-masing golongan, suku, ras, dan agama. Utamakan kesamaan dan kesatuan kita sebagai saudara sebangsa, yang punya kesamaan tujuan sebagai satu bangsa Indonesia. Ingatlah bahwa tanah air kita, Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Negeri yang mampu menarik bangsa asing untuk berusaha menguasai limpahan kekayaan alam ibu pertiwi. Bersatulah untuk fokus memajukan negeri ini, memanfaatkan kekayaan Nusantara sembari mewaspadaikan kekuatan asing yang ingin merampas kekayaan alam Indonesia.

Jauhi konflik sesama anak bangsa, karena jika dilihat dari sudut pandang yang lebih lebar akan terlihat bahwa sebagian besar konflik sosial kemungkinan besar sengaja diawali oleh pihak asing yang punya agenda berbeda dengan agenda besar bangsa Indonesia. ●





Taklimat Awal Pemeriksaan Bpk RI Atas Laporan Keuangan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2016 (16 Januari 2017).



Evaluasi Dampak Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Bengkulu (10 Maret 2017).



Kunjungan Prof. J Scott Younger ke Lemhannas RI (16 Februari 2017).



Peresmian Laboratorium Jajak Pendapat Lemhannas RI (01 Februari 2017).



Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Lemhannas RI (17 Januari 2017)





Universitas Muhammadiyah Purwokerto Kunjungi Lemhannas RI (20 Februari 2017)



Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pesawar Provinsi Lampung (06 Februari 2017)



Delegasi Harvard Kennedy School Kunjungi Lemhannas RI (24 Januari 2017)



Workshop Penyusunan Baseline dan Program Prioritas Lemhannas RI T.A. 2018 (16 Januari 2017)



BSI Group Indonesia Berikan Sertifikat ISO 9001-2015 pada Lemhannas RI (01 Februari 2017)



# RENCANA JADWAL KEGIATAN PENTING LEMHANNAS RI TAHUN 2017

## DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

### Program Pendidikan Reguler Angkatan LII (PPRA-53)

- 10 APRIL : NAC
- 11 APRIL : DIREKTIF OS
- 11 - 13 APRIL : OUTBOUND
- 13 APRIL : DIREKTIF BUDAYA LOKAL
- 17 APRIL - 18 MEI : BLOK I
- 20 APRIL : DIREKTIF BADAN KONSULTAN SEMINAR
- 26 APRIL : DIREKTIF SSDN
- 3 MEI : DIREKTIF SSLN
- 4 MEI : MLM PERKENALAN & INTERNATIONAL NIGHT
- 22 MEI : HUT LEMHANNAS RI
- 24 MEI : KPP - I
- 29 MEI - 2 JUNI : TIM AJU POS NEG SAHABAT
- 5 - 9 JUNI : TIM AJU SSDN
- 19 JUNI : LAP SIAP POS NEG. SAHABAT
- 23 - 28 JUNI : CUTI BERSAMA

### Program Pendidikan Singkat Angkatan XX (PPSA 20)

- 6 JUNI : KESIAPAN PEMBUKAAN
- 13 JUNI : BUKA
- 13 - 21 JUNI : ORIENTASI
- 23 - 28 JUNI : CUTI BERSAMA

## DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

- 3 - 12 APRIL : TOT JAWA BARAT
- 3 - 9 APRIL : TAPLAI ADAKSI XLII
- 18 APRIL : DIALOG DENGAN PARA TOKOH PEMUDA AGAMA & ELEMEN MASYARAKAT
- 2 - 11 MEI : TOT JAKARTA 1
- 15 - 17 MEI : EVDAM SULAWESI TENGAH

## DEPUTI BIDANG PENGAJIAN STRATEGIK

### Ditjian Politik

- 2 APRIL - 6 APRIL : LOCUS (Gorontalo) Kajian Jk. Panjang Ditjian Politik
- 19 APRIL : FGD Penulisan Buku Tannas Ditjian Politik
- 27 APRIL : RTD Kajian Jk. Panjang Ditjian Politik
- 31 MEI : FGD Kajian Jk. Pendek Ditjian Politik
- 21 JUNI : RTD Kajian Jk. Pendek Ditjian Politik

### Ditjian Ekonomi

- 20 APRIL : RTD Kajian Jk. Panjang Ditjian Ekonomi
- 3 - 4 MEI : RTD Kajian Jk. Panjang Ditjian Ekonomi
- 6 JUNI : RTD Kajian Jk. Menengah-1 Ditjian Ekonomi

### Ditjian Sosbud

- 25 - 26 APRIL : FGD Jakarta Geopolitic Forum (JGF) Ditjian Sosbud
- 18 - 20 MEI : RTD Kajian Jk. Menengah-1 Ditjian Ekonomi
- 15 JUNI : FGD Kajian Quick Respons-2 Ditjian Sosbud

### Ditjian Hankam

- 6 APRIL : RTD Kajian Jk. Panjang Ditjian Hankam
- 18 APRIL : RTD Kajian Jk. Menengah-1 Ditjian Hankam

### Ditjian International

- 10 APRIL : RTD Kajian Jk. Menengah-2 Ditjian Internasional
- 11 APRIL : Kegiatan Nuffic, Konsinyering Quality Management System (QMS) di Bogor.
- 13 APRIL : FGD Kajian Quick Respons-1 Ditjian Internasional
- 16 MEI : RTD Kajian Jk. Panjang Ditjian Internasional
- 30 MEI : FGD Kajian Jk. Menengah-1 Ditjian Internasional
- 13 JUNI : RTD Kajian Jk. Menengah-1 Ditjian Internasional



KELUARGA BESAR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



MENGUCAPKAN

*Selamat  
Hari Raya Nyepi  
Tahun Baru Saka 1939*



Mari Sukseskan

# Jakarta Geopolitical Forum

18 - 20 Mei 2017

Lembaga Ketahanan Nasional RI

# Geopolitics in a Changing World 2017

